DEKLARASI
HARI MUSEUM INDONESIA

Oleh : Nunus Supardi

Direktorat
udayaan

Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2016

DEKLARASI
HARI MUSEUM INDONESIA

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

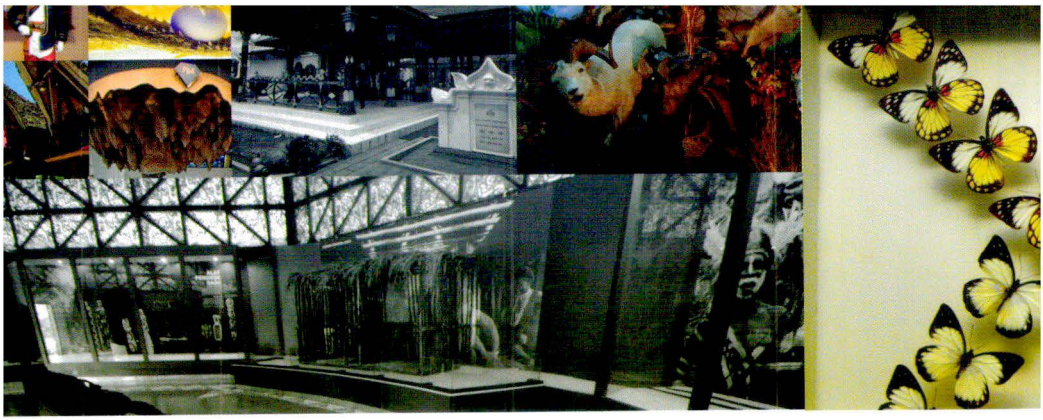

DEKLARASI HARI MUSEUM INDONESIA

Penanggungjawab
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Penulis
Nunus Supardi

Perwajahan
True A Design

Cetakan Pertama
2016

ISBN No 978-979-8250-57-6

Diterbitkan oleh
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sambutan
Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Harry Widianto

Indonesia memiliki 428 museum saat ini, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta, serta menyajikan koleksi yang sangat bervariasi. Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Peran dan fungsi museum ini perlu terus dikembangkan agar manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Museum merupakan media pembelajaran bagi masyarakat yang bersifat edukatif sekaligus menghibur.

Di dalam perkembangan dunia permuseuman, sekarang ini museum lebih berorientasi pada publik. Hal tersebut menjadikan museum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersama-sama dengan berbagai *stakeholder* untuk mengembangkan dan memanfaatkan museum. Museum menjadi tempat bertemunya berbagai kebudayaan Indonesia yang saling berinteraksi. Dengan demikian, museum juga menjadi salah satu tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Untuk lebih mendorong komunikasi dan interaksi antara museum dan masyarakat, dipandang perlu adanya "Hari Museum" yang diperingati secara nasional, sehingga dapat menanamkan kecintaan masyarakat terhadap museum. Peristiwa yang diperingati secara tahunan ini diharapkan menjadi pengingat dan pendorong bagi seluruh insan permuseuman bersama masyarakat untuk bergerak bersama mendinamisasikan museum di seluruh Indonesia.

Berdasarkan kesepakatan di antara insan permuseuman, telah disepakati tanggal 12 Oktober sebagai Hari Museum Indonesia. Tanggal tersebut diambil dari sejarah terselenggaranya Musyawarah Museum se-Indonesia pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1962 di Yogyakarta. Hari Museum Indonesia telah dideklarasikan di Balai Kota Malang pada tanggal 26 Mei 2015. Buku ini merupakan bentuk publikasi kepada masyarakat tentang Hari Museum Indonesia yang ditulis oleh Bapak Nunus Supardi. Penentuan ini merupakan sebuah kesepakatan bersama dan telah dibahas dalam berbagai diskusi.

Semoga dengan dipilihnya tanggal tersebut sebagai Hari Museum Indonesia, dapat mendorong kemajuan museum di Indonesia. Selanjutnya menjadi kewajiban kita untuk setiap tahun memperingati Hari Museum Indonesia bersama dengan masyarakat.

Pengantar Penulis

Nunus Supardi

Cita-cita para museawan untuk memiliki "Hari Museum Indonesia" akhirnya terwujud, ditandai dengan suatu deklarasi bersama. Mulai dari pemilihan hingga ditetapkannya "Hari Museum Indonesia" telah melalui proses yang cukup panjang. Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

Proses mencapai satu kesepakatan bersama itu menjadi bagian penting bagi sejarah permuseuman di Indonesia. Kesepakatan antara para Kepala Museum seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Museum Indonesia (AMI), komunitas dan pemerhati museum, dengan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai setelah melalui seminar, diskusi dan rapat-rapat.

Proses pemilihan yang cukup lama itu patut dipaparkan dan didokumentasikan agar semua pihak mengetahui latar belakang, alasan dan tujuannya. Dalam buku berjudul "DEKLARASI HARI MUSEUM INDONESIA" ini secara sekilas dipaparkan proses pemilihan "hari" itu.

Dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang, pengertian dan metode pendekatan pemilihan. Diteruskan dengan beberapa contoh "Hari Besar" di bidang kebudayaan, termasuk di beberapa negara. Selanjutnya, dipaparkan secara agak rinci mengenai proses pemilihan, mulai dari Seminar di Yogyakarta (2010), dilanjutkan dengan diskusi di Museum Kebangkitan Nasional (2014) dan diskusi finalisasi di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (2015). Dari ketiga kegiatan itulah akhirnya mengristal, dan memilih tanggal 12 Oktober sebagai "Hari Museum Indonesia".

Selanjutnya, kesepakatan itu dideklarasikan di acara "Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia 2015" di Balai Kota Malang, tanggal 26 Mei 2015, oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Kacung Marijan, Ph.D.

Mengiringi pendeklarasian itu, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi seluruh museum di Indonesia dalam ikut merayakan "Hari Museum Indonesia" di setiap tanggal 12 Oktober sebagai hari besar museum Indonesia.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dan penerbitan buku ini.

Jakarta, 14 Juni 2016

Daftar Isi

Sambutan iv

Pengantar Penulis vi

Daftar Isi viii

Pendahuluan 1

"Hari-Hari Besar" Bidang Kebudayaan 7

Beberapa Pendekatan Memilih "Hari" 11

Proses dan Hasil Pemilihan Hari Museum Indonesia 19

Finalisasi Pemilihan Hari Museum Indonesia 29

Deklarasi Hari Museum Indonesia 45

Penutup 50

Daftar Referensi 51

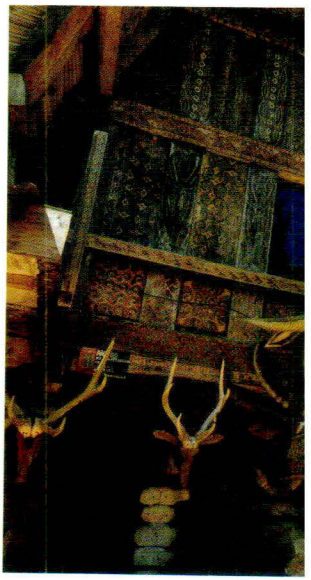

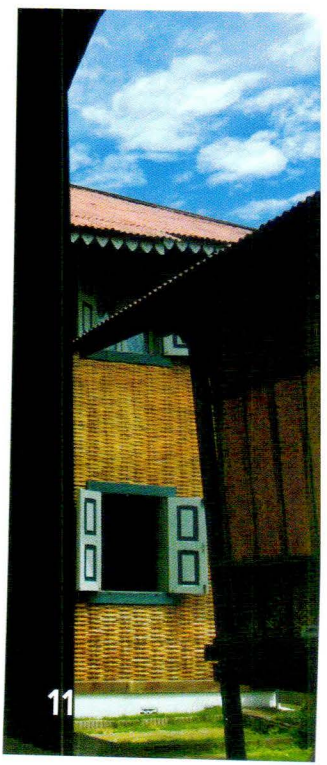

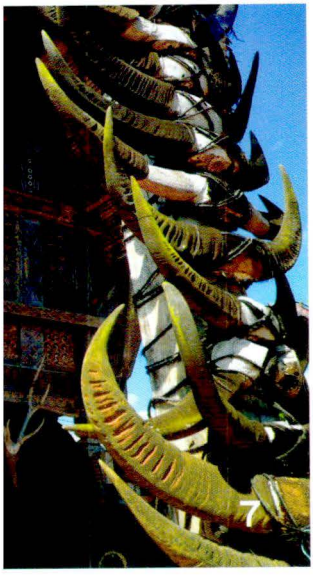
7

19

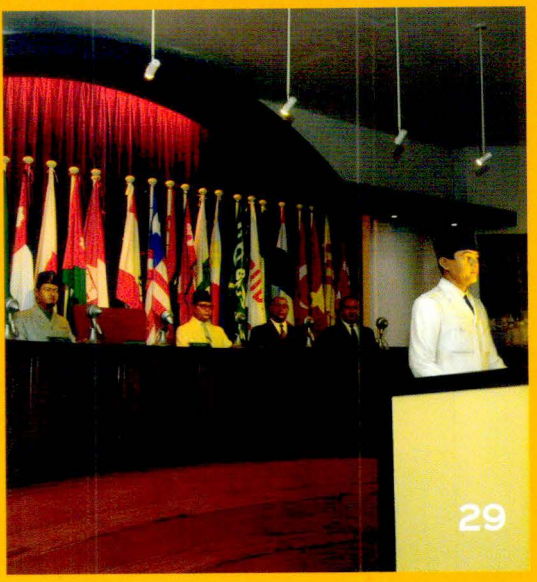
29

45

50

Terima kasih kepada narasumber:

Prof. Kacung Marijan Ph.D

Prof. Dr. Edi Sedyawati

Prof. Dr. Djoko Suryo

Prof. Dr. Agus Aris Munandar

Prof. Dr. Inajati Romli

Soedarmadji Damais

Dr. Daud Aris Tanudirjo

Dr. Endang Sri Hardiati

Dr. Harry Widianto

Dra. Intan Mardiana, M. Hum.

Drs. Luthfi Asiarto

Thomas Harjonegoro

Drs. Dani Wigatna

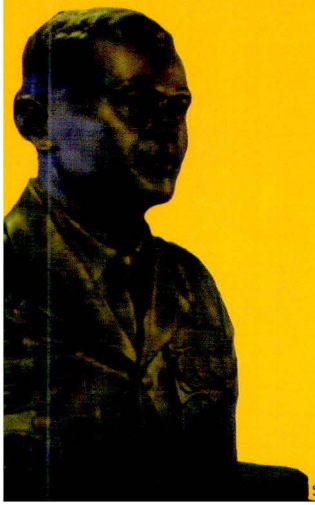

Bung Karno mengingatkan kita:
"...tatkala kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi itu bukan hanya berarti proklamasi daripada sesuatu negara yaitu Republik Indonesia, tetapi proklamasi daripada kepribadian kita sendiri. Kemerdekaan berarti: bangun kembali, kembali, kembali, kembali kepada kepribadian sendiri. Kerjakanlah darma kewajiban itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

(Ulang Tahun Badan Kerja Sama Kesenian Mahasiswa Indonesia 16/4/1959)

Pendahuluan

Seperti halnya di kalangan purbakalawan telah memiliki Hari Purbakala, yang diperingati pada setiap tanggal **14 Juni**, kalangan museawan juga ingin memiliki "Hari Museum Indonesia". Keinginan itu sudah lama digaungkan tetapi kehadirannya tidak secepat Hari Purbakala. Para arkeolog dengan cepat menyepakati "tanggal" itu sebagai "Hari Purbakala Indonesia". Kesepakatan itu didasarkan "tanggal" berdirinya *Oudheidkundige Dienst* (OD) atau Dinas Purbakala, tanggal 14 Juni 1913. Sementara itu, untuk memilih "Hari Museum Indonesia", harus melalui proses yang cukup panjang.

Salah seorang yang pernah menulis tentang perlunya "Hari Museum Indonesia" justru datang dari kalangan luar museum. Ia adalah Drs. Tashadi, seorang peneliti dan pernah menjabat Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Yogyakarta. Sekitar tahun 1990-an dalam sebuah tulisannya ia mengusulkan agar berdirinya perkumpulan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW) – sekarang menjadi Museum Nasional - tanggal 24 April (1778) ditetapkan sebagai Hari Museum Indonesia.

Tampaknya, dari kalangan permuseuman sendiri usul tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Badan Dunia yang mengurus Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* disingkat UNESCO) menggencarkan program *International Museum Day* (IMD) atau "HARI MUSEUM SEDUNIA", di setiap tanggal 18 Mei ke seluruh negara. Setiap kali peringatan yang dikoordinasikan oleh *International Council of Museums* (ICOM) itu, kepada seluruh negara anggota UNESCO diimbau untuk berpartisipasi. Programnya diarahkan untuk mendorong tumbuhnya kegiatan-kegiatan kreatif dengan menggerakkan seluruh elemen museum di masing-masing negara. Kalangan permuseuman mulai mengakui dengan melakukan kegiatan peringatan pada "tanggal" itu, selain penting artinya

Koleksi Museum Geologi

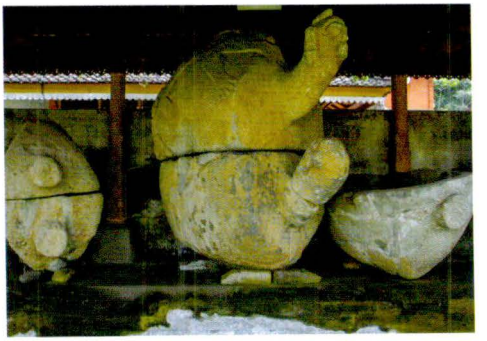

Koleksi Museum Arca

Kunjungan Pelajar di Museum Batik Kuno Danar Hadi

bagi perkembangan museum itu sendiri, juga penting artinya untuk menanamkan kecintaan masyarakat terhadap museum. Masyarakat mulai memahami arti dan peran kehadiran museum, tidak hanya dipandang sebagai tempat berekreasi tetapi juga tempat belajar berbagai ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Seperti dijelaskan di dalam pedoman ICOM, tujuan peringatan IMD adalah "memberikan kesempatan para profesional museum untuk bertemu dengan anggota masyarakat, menghadapi segala tantangan dalam perannya melayani kebutuhan masyarakat dan untuk mengembangkan museum masing-masing". *(The event provides the opportunity for museum professionals to meet the public and alert them to the challenges that museums face if they are to be — as in the ICOM definition of museums — 'an institution in the service of society and of its development').*

Secara berturut-turut, tema yang pernah dicanangkan oleh ICOM adalah sebagai berikut: 2015 - *Museum for a Sustainable Community; 2014 - Museum collections make connections; 2013 - Museums (memory + creativity = social change); 2012 - Museums in a changing world: new challenges, new inspirations; 2011 - Museum and memory; 2010 - Museums for social harmony; 2009 - Museums and tourism; 2008 - Museums as agents of social change and development; 2007 - Museums and universal heritage; 2006 - Museums and young people; 2005 - Museums bridging cultures; 2004 - Museums and intangible cultural heritage; 2003 - Museums and friends; 2002 - Museums and globalization; 2001 - Museums: building community; 2000 - Museums for peace and harmony in society; 1999 - Pleasures of discovery; 1998-1997 - The fight against illicit traffic of cultural property; 1996 - Collecting today for tomorrow; 1995 - Response and responsibility; 1994 - Behind the scenes in museums; 1993 - Museums and indegenous peoples; 1992 - Museums and environment.*

Meskipun ICOM mengkoordinasikan IMD sejak tahun 1977, tetapi kegiatan itu benar-benar mendapat perhatian dari museum-museum di dunia baru mulai tahun 2009. Pada tahun itu peringatan diikuti oleh 20.000 museum dari lebih 90 negara. Tahun 2010 diikuti 98 negara, dan di tahun 2011 oleh 100 negara.

Tahun 2012 meningkat lagi diikuti oleh 129 negara dan 30.000 museum dan dimeriahkan dengan poster dalam 37 bahasa. Indonesia sebagai sebagai salah satu anggota UNESCO/ICOM setiap tahun tidak ketinggalan juga ikut serta melakukan peringatan. Berbagai kegiatan dilaksanakan di berbagai daerah, dikoordinasikan oleh Direktorat Museum yang kini berubah nama menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (PCBM). Bersama-sama dengan Asosisasi Museum Indonesia (AMI) dan komunitas museum, macam dan bentuk kegiatan yang dirancang disesuaikan dengan tema yang telah ditentukan oleh ICOM.

Sejak Indonesia ikut-serta dalam peringatan itu, keinginan komunitas museum agar Indonesia juga memiliki "Hari Museum Indonesia" tersendiri semakin menguat. Tahun 2009 Dra. Intan Mardiana,M.Hum (Direktur Permuseuman) ketika menjawab pertanyaan Kompas menyatakan bahwa:"...*untuk Indonesia akan dirumuskan apakah berdasarkan penanggalan berdirinya museum yang tertua di Indonesia atau ada hal lain*"(Kompas, 18/4/2009).

Seiring perjalanan waktu, wacana untuk memiliki "Hari Museum Indonesia" makin menguat dan meluas. Tahun 2010 mulai dirintis dengan menyelenggarakan seminar di Yogyakarta dengan tema "Memilih Hari Museum Indonesia". Dilanjutkan dengan diskusi dan sosialisasi di Museum Kebangkitan Nasional tahun 2014, dan yang terakhir diskusi finalisasi di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tanggal 23 April tahun 2015 yang lalu.

PENGERTIAN "HARI"

Mengantarkan tulisan tentang "Deklarasi Hari Museum Indonesia", ada baiknya dijelaskan lebih dahulu arti kata "hari" dan "tanggal". Dalam menentukan pilihan suatu "hari penting", kedua kata itu memiliki kaitan yang dekat. Ketika mendengar kata "hari" pemahaman kita akan langsung pada arti "*waktu dari pagi sampai pagi lagi, selama 24 jam*" (KBBI, 2007: 389). Dalam satu minggu ada 7 hari, masing-masing punya nama, yakni: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu.

Selain itu, kita juga sering memaknai kata "hari" dalam arti "tanggal". Misalnya, ketika kita menyebut "hari penting", "hari bersejarah", "hari besar", atau "hari raya" untuk diperingati, di sini yang digunakan sebagai patokan adalah "tanggal" peristiwa itu berlangsung. Bukan berdasarkan nama "hari" ketika peristiwa itu berlangsung. Sebagai contoh "Hari Ibu" tanggal 22 Desember (1928). Disebut demikian karena pada "tanggal" itu ditetapkan sebagai "hari penting" dan bersejarah dalam pergerakan kaum perempuan (Ibu) di Indonesia. Untuk itu pada "tanggal" itu (bukan "hari") dilakukan kegiatan peringatan. Demikian pula halnya dengan "Hari Pahlawan", peringatan diselenggarakan pada "tanggal" yang ditetapkan sebagai "hari penting", yaitu pada "tanggal" berkobarnya semangat perang arek-arek Surabaya membela negara RI melawan Belanda. Peristiwa itu terjadi pada tanggal **10 November** (1945).

Meskipun disebut "hari" tetapi dengan dua contoh itu acara peringatan dilaksanakan tidak lagi dilaksanakan pada "hari" peristiwa itu berlangsung melainkan pada "tanggal" yang telah ditetapkan, yakni tanggal 22 Desember untuk Hari Ibu, dan tanggal 10 November untuk Hari Pahlawan. Kata "tanggal" di sini menurut kamus berarti "bilangan yang menyatakan hari yang ke berapa dalam bulan" (KBBI, 2007: 1137).

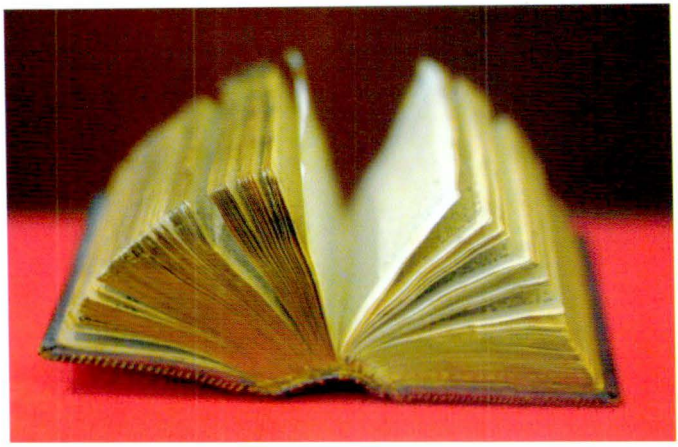

Koleksi Museum Alkitab

Ruang Diorama di Museum Benteng Vredeburg

Patung Pahlawan Nasional di Museum Keprajuritan

Makna kata *"hari"* dari 2 contoh itu lebih sebagai pengertian *"selama satu hari dari tanggal tersebut diselenggarakan acara peringatan"*. **"Tanggal"** peringatan akan selalu tetap, tetapi **"hari"** penyelenggaraan peringatan akan berbeda-beda sesuai dengan perputaran waktu. Dalam praktek "hari penting" itu dapat saja diperingati lebih dari satu hari.

Berbeda dengan 2 contoh di atas adalah pengertian "hari" pada "Hari Krida". Ketika kita duduk di bangku sekolah dasar (dulu) sekitar tahun 1960-an dalam jadwal pelajaran tercantum "Hari Krida". Antara hari Senin hingga Sabtu secara khusus siswa diberikan pelajaran keterampilan, olahraga, kerajinan tangan, kesenian, dll. Pada contoh ini pemakaian kata "hari" sudah pasti, tidak akan berubah, dan tidak tergantung pada "tanggal".

Mengenai tingkatan, jangkauan dan tujuan dalam melaksanakan acara peringatan suatu "hari penting", akan berlangsung berbeda-beda, disesuaikan dengan tema "hari" yang diperingati. Tingkatan peringatan dapat berlangsung secara sederhana, agak besar, besar, dan sangat besar (besar-besaran). Jangkauan (*scope*) peringatan juga bervariasi: pribadi (ulang tahun kelahiran), terbatas (komunitas tertentu), lokal (desa, kota, ibukota), nasional, regional dan internasional.

Sementara itu, mengenai tujuannya pun berbeda-beda. Ada peringatan yang tujuannya untuk mengingat, mengenang, menghormati kembali suatu peristiwa. Atau untuk merevitalisasi dan mengaktualisasi keberadaan lembaga atau organisasi. Di Jepang tujuan ditetapkannya "Hari Kebudayaan" misalnya, adalah untuk menyebarluaskan kebudayaan melalui berbagai acara seperti pameran, festival, parade dll. (*"promoting culture, the arts, and academic endeavour. Festivities typically include art exhibitions, parades, and award ceremonies for distinguished artist and scholars"*).

Mengenai lama belangsungnya peringatan suatu "hari penting" juga berbeda-beda, tergantung pada besar-kecilnya semangat dari penyelenggara. Ada yang hanya berlangsung sehari, ada yang sepekan, seminggu, dan ada yang sebulan atau lebih. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada acara peringatan yang disebut secara jelas sebagai "pekan" atau "minggu", yaitu *National Library Week* setiap tanggal **21 Februari**.

Aktivitas yang Dapat Dilakukan Pengunjung di Museum Layang-Layang

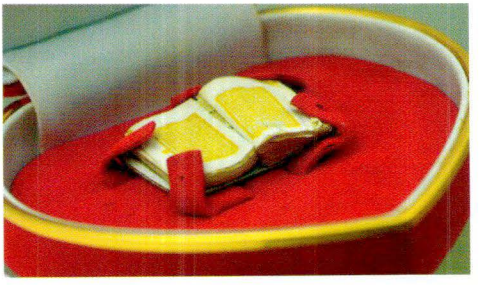

Mushaf Cetakan Mini, Koleksi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal

Di Indonesia ada kegiatan peringatan yang berlangsung selama satu bulan, yaitu "Bulan Bahasa dan Sastra", pada setiap tanggal **28 Oktober** setiap tahun.

Di dunia internasional ada hari yang berlangsung selama 6 bulan, yaitu "Hari Geofisika Internasional (GI)". Peringatan "hari" itu dimulai tanggal 1 Juli (1957) – 31 Desember (1958). Hari "GI" ditetapkan oleh Himpunan Geodesi dan Geofisika Internasional sebagai periode dilakukannya pengamatan geofisika secara luas oleh seluruh stasiun geofisika di dunia (KBBI, 2007: 1122).

Bagaimana halnya dengan nama "Tahun Vivere Pericoloso" yang disingkat menjadi TAVIP? Meskipun mengandung makna seperti halnya kata "hari" atau "tanggal" tetapi kata "tahun" pada contoh ini bukan merupakan suatu pilihan "tahun" dari suatu peristiwa penting untuk diperingati selama satu tahun. Itu adalah nama atau judul dari pidato Bung Karno ketika memeringati HUT ke-19 Indonesia Merdeka tahun 1964, yang sering diterjemahkan menjadi "Tahun Nyrèmpèt-nyrèmpèt Bahaya".

Aktivitas yang Dapat Dilakukan Pengunjung Mahasiswa di Museum Transportasi TMII

Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Kini Menjadi Museum Nasional, Jakarta

Pangeran Sosrodiningrat IV, Pendiri Museum Radya Pustaka, Surakarta
(Sumber:http://mradiofm.com/detail)

R.A.A Kromodjojo Adinegoro, Bupati Mojokerto, Pendiri Museum Mojokerto
(Sumber:http://mradiofm.com/detail)

Pangeran Mangkunegoro VII Pendiri Museum Mangkunegaran dan Museum Sonobudoyo
(Sumber:http://mradiofm.com/detail)

"HARI-HARI BESAR" BIDANG KEBUDAYAAN

Museum Buntu Kalando

Koleksi Pakaian Perang di Museum Pusaka Nias

Ada beberapa "hari besar" di b kebudayaan yang telah ditetapkar diperingati, baik untuk tingkat na maupun internasional (dunia). U tingkat internasional penetapa dikoordinasikan oleh UNESCO se lembaga internasional di bidang kebudayaan.

"Hari besar" di bidang kebudayaan yang be internasional yang sudah ditetapkan antara lain a (1) *International Mother Language Day*, setiap tangg Februari; (2) *World Heritage Day*, 18 April; (3) *Lite Day* setiap tanggal 19 April; (4) *World Book and Cop Day*, tanggal 23 April; (5) *International Museum* tanggal 18 Mei; (6) *World Cultural Day*, tanggal 2 (7) *Philosophy Day*, setiap bulan tanggal 21 Nove dan (8) *International Literacy Day*, diperingati tanggal 8 Desember. Selain itu, beberapa negara telah menetapkan "hari besar" bidang kebud tersendiri. Negara-negara yang memiliki "hari bes

antara lain: (1) Kamboja menetapkan *National Cultural of Cambodia*, tanggal 23 setiap bulan Mei; (2) Amerika Serikat menetapkan *National Library Week* tanggal 21 Februari; (3) sama tanggal dan bulannya dengan di AS, Bangladesh menetapkan tanggal 21 Februari sebagai *Language Movement Day*; (4) Jepang menetapkan *Bunka no-Hi* (Hari Kebudayaan) tanggal 3 November; dan *Music Day* tanggal 4 Mei; (5) India, menetapkan *Indian Cultural Day* tanggal 27 April; (6) Korea Selatan menetapkan *Chusok atau Harvest Festival Day* tanggal 25 Agustus; (7) *Cultural Heritage Day* di China diselenggarakan setiap tanggal 16 Juni; dan (8) *National Punctuation Day* di USA setiap tanggal 24 September.

Di Indonesia juga telah disepakati beberapa "hari besar" di bidang kebudayaan. "Hari besar" itu antara lain: (1) Hari Musik Nasional, tanggal **9 Maret;** (2) Hari Film Nasional tanggal **30 Maret**; (3) Hari Buku Nasional, tanggal **17 Mei**; (4) Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Juni; (5) Hari Purbakala tanggal **14 Juni,** yakni saat berdirinya lembaga *Oudheidkundige Dienst*, tanggal 14 Juni 1913; (6) Hari Aksara tanggal **8 September**; (7) Hari Kesaktian Pancasila, tanggal **1 Oktober**; (8) Hari Sumpah Pemuda/Bulan Bahasa dan Sastra, tanggal **28 Oktober;** (9) Hari Teater Nasional, setiap tanggal **12 Desember**; dan (10) Hari Sejarah tanggal **14 Desember,** saat diselenggarakan Seminar Sejarah pertama di Yogyakarta.

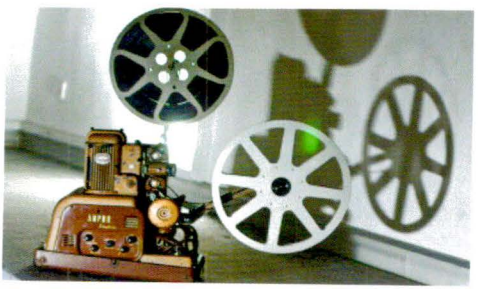

Alat Proyektor Film
di Museum Benteng Vredeburg

Monumen Pancasila Sakti

Jika dari contoh di atas negara-negara Kamboja, India dan Jepang telah memiliki "Hari Kebudayaan", Indonesia sebagai negara multietnik, multikultur, multibahasa dan multimental seharusnya juga memiliki "Hari Kebudayaan." Upaya untuk memilih dan menetapkan sudah pernah dilakukan. Organisasi kebudayaan di masyarakat Lingkar Budaya Indonesia (LBI) bekerjasama dengan Paguyuban Puspo Budoyo, Media Group, Balai Kartini, Radio Republik Indonesia (RRI), dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2007 pernah menyelenggarakan Diskusi Budaya dengan sasaran memilih "Hari Kebudayaan".

Salah satu pilihan "hari", yang diusulkan adalah tanggal **5 Juli** (1918) yakni saat diselenggarakannya Kongres Kebudayaan pertama di Solo yang diprakarsai oleh Mangkunegoro VII (Kompas, 5/7/2007). Kongres itu menjadi bersejarah karena telah meletakkan dasar-dasar tentang konsep, kebijakan dan strategi pengembangan kebudayaan yang ternyata masih relevan hingga kini.

Sebagai tonggak sejarah kebudayaan, dari kongres itu juga telah melahirkan berbagai lembaga kebudayaan yang baru. Di samping itu, juga menjadi motor penggerak di selenggarakannya kongres - kongres kebudayaan berikutnya. Dari data yang terkumpul, sejak tahun 1918 hingga sekarang jumlahnya sudah mendekati angka 221 kali kongres (Supardi, 2013: 625).

Tetapi karena usul "Hari Kebudayaan" melalui seminar yang dibuka oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Ir. Jero Wacik itu tidak ada tindaklanjutnya, maka gaung usulan itu kini nyaris tak terdengar lagi. Sementara itu, Jepang yang disebut-sebut sebagai bangsa yang memiliki tradisi yang kuat, salah satu tujuan menetapkan "Hari Kebudayaan" adalah untuk menghadapi modernisasi. Jepang menetapkan tanggal **3 November** sebagai *Bunka-no-Hi* atau "Hari Kebudayaan" sudah ada sejak tahun 1868. Di setiap tanggal itu, dalam rangka peringatan hari lahir Kaisar Meiji dijadikan sebagai "hari gembira". Setelah perang, mulai tahun 1946 dijadikan sebagai "Hari Kebudayaan Jepang". Uniknya, Jepang juga merupakan satu-satunya negara di dunia yang menyatakan "Hari Kebudayaan" itu sebagai hari libur nasional.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2015-2016), Dr. Anies Baswedan Setelah Membuka Pameran Gelar Museum Nusantara 2014 di Jakarta Convention Center Jakarta, tanggal 22 November 2014, berkeliling menyaksikan koleksi pameran. Tampak Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Kacung Marijan, Ph.D bersama Dr. Harry Widianto, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman sedang memberikan penjelasan disaksikan oleh undangan.

BEBERAPA PENDEKATAN MEMILIH "HARI"

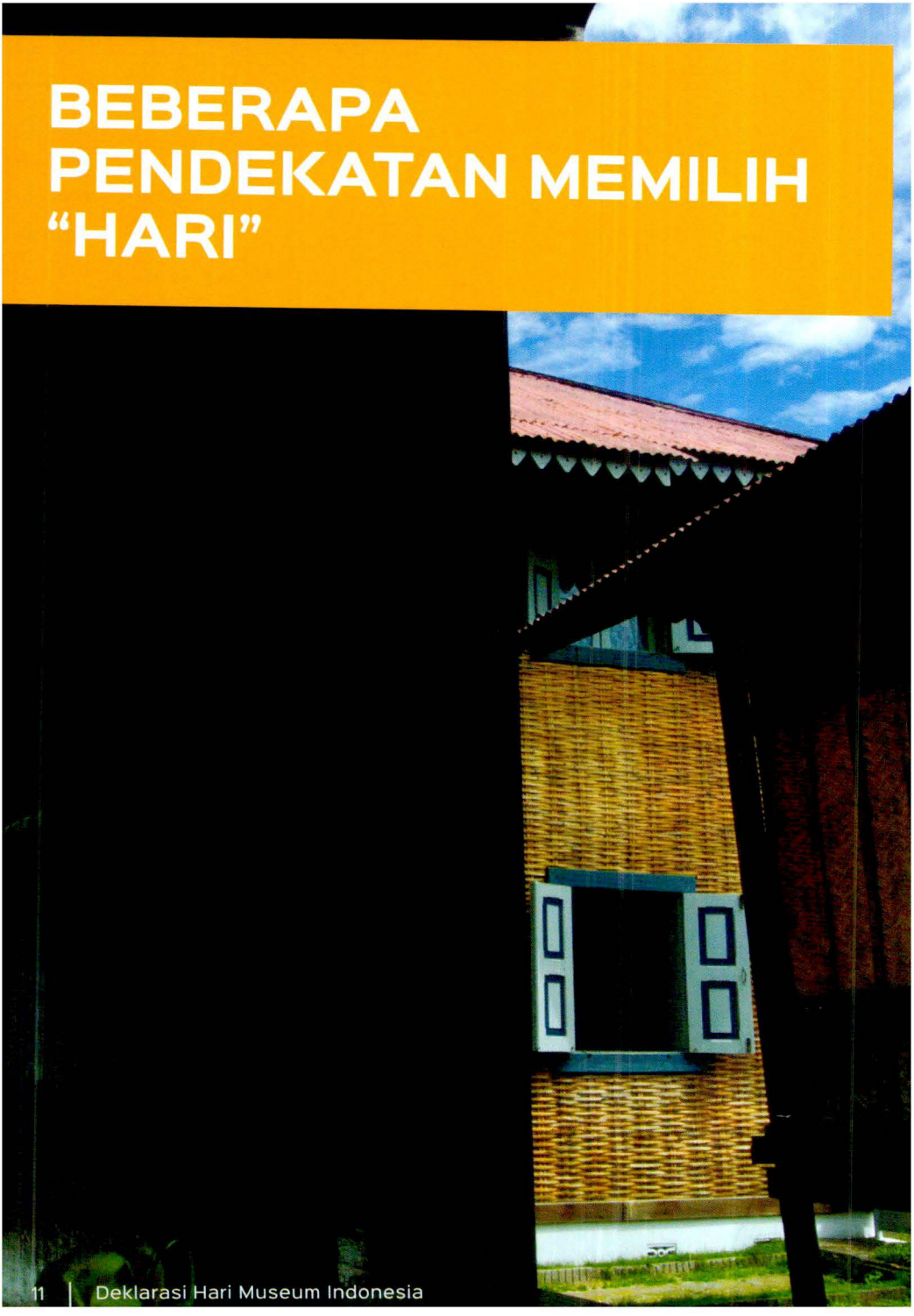

Memilih dan menentukan "hari", atau lebih tepat menentukan"tanggal" untuk dijadikan hari jadi atau hari ulang tahun atau hari yang dijadikan titik tolak untuk diperingati dari suatu lembaga atau organisasi, dilatarbelakangi oleh alasan yang berbeda-beda. Ada beberapa contoh yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan yang digunakan.

Ketika akan menentukan hari film, terjadi perdebatan yang cukup seru. Ada yang berpendapat, hari film sebaiknya ditetapkan berdasarkan pada pemutaran film pertama yang terjadi di bumi Nusantara ini. Film diputar pertama kali di Batavia tahun **1924**, yakni film buatan China Shanghai. Sementara yang lain mengusulkan agar menggunakan dasar film pertama dibuat di Indonesia. Film itu berjudul "Loetoeng Kasaroeng" yang diangkat dari legenda Sunda, dibuat oleh *N.V. Java Film Company* yang didirikan oleh *L. Houveldrop dan G. Krügers* dari Bandung tahun **1926** (Biran, 2009: 60).

Setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya dipilih tanggal **30 Maret** sebagai "Hari Film Nasional". Tanggal itu dipilih karena untuk pertama kalinya dilakukan *shooting* film berjudul "Darah dan Doa" yang disutradarai oleh Usmar Ismail pada tahun 1950. Ini berarti pada saat itu ada seorang bumiputra yang untuk pertama kali membidikkan kamera pertama membuat film cerita. Pemilihan peristiwa itu menjadi "Hari Film Nasional" mencerminkan kuatnya rasa kebangsaan, dan merupakan bentuk penghargaan terhadap karya anak bangsa dan bukan produk zaman Hindia Belanda. Semangat nasionalisme dijadikan titik tolak dalam menentukan pilihan.

Contoh lain adalah pemilihan "Hari Kereta Api". Kita semua tahu kereta api sudah beroperasi sejak zaman Hindia Belanda. Pilihan tidak dijatuhkan pada saat roda kereta api digelindingkan pertama kali dari desa Kemijen menuju desa Tanggung, Semarang, sepanjang 26 km pada tanggal **17 Juni 1864.** Pilihan "Hari Kereta Api" adalah tanggal **28 September** (1945) ketika para karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam *Angkatan Moeda Kereta Api* (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pemerintah Jepang. Lagi-lagi pilihan itu mencerminkan kuatnya alasan semangat kebangsaan sebagai kriteria untuk menetapkan pilihan "hari" itu.

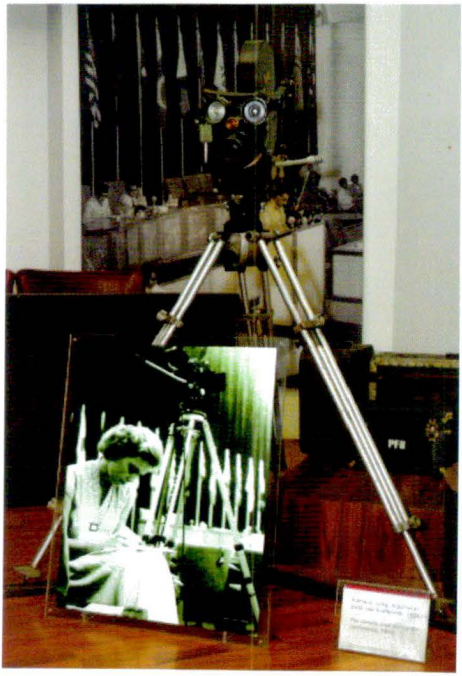

Kamera yang digunakan Pada Konferensi Asia Afrika di Museum Konferensi Asia Afrika

Ruang Teater di Museum Benteng Vredeburg

Museum Kereta Api Ambarawa

Hari Radio Republik Indonesia (RRI)

Koleksi Radio di Museum Naskah Proklamasi

Bagaimana dengan lahirnya Hari Radio Republik Indonesia (RRI)? Sebagaimana telah diketahui banyak orang, pada tanggal **1 April (1933)** Mangkunegoro VII mendirikan *"Solosche Radio Maatschappij"* (SRM). Lembaga ini telah berjasa dalam memberikan layanan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan hiburan melalui siaran radio.

Tetapi kemudian yang dipilih sebagai "Hari Radio" adalah berdirinya RRI tanggal **11 September** (1945) dengan slogannya *"sekali di udara, tetap di udara"*. Dalam hal ini pemilihan didasarkan pada tanggal pendirian RRI tanggal **11 September**, dan bukan mengambil tanggal **1 April** (1933), berdirinya SRM. Pilihan ini didasarkan pada alasan rasa kebangsaan dan nilai patriotik dari peristiwa tersebut.

Hari Pendidikan Nasional

Lain lagi dengan dasar yang digunakan dalam pemilihan tanggal **2 Mei** sebagai "Hari Pendidikan Nasional" yang disingkat Harpenas atau Hardiknas. Pilihan didasarkan pada hari atau tanggal lahir Ki Hadjar Dewantara (2 Mei 1889), tokoh pendidikan yang telah banyak berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan di Indonesia, sehingga dinobatkan sebagai "Bapak Pendidikan Indonesia". Ini berarti penentuan "hari" didasarkan pada jasa tokoh dan hari kelahiran tokoh.

Hari Ibu

Sementara itu, dalam penetapan "Hari Ibu" tanggal **22 Desember** didasarkan pada bertemunya para pejuang wanita dalam suatu kongres, yakni Kongres Perempuan Indonesia I, tanggal **22-25 Desember** 1928 di Yogyakarta. Peristiwa itu dinilai sebagai salah satu tonggak sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia. Peristiwa itu dinilai lebih bersejarah dibandingkan dengan berdirinya organisasi perempuan pertama, 16 tahun sebelum Kongres Perempuan Indonesia I, yaitu di tahun 1912.

Hari Lahir Kota Yogyakarta

Interior Guwa Selo Giri, Museum Ullen Sentalu

Bagaimana dengan pemilihan "hari" lahir kota Yogyakarta? Ada tiga "tanggal" penting yang dapat dijadikan pilihan. *Pertama*, tanggal 13 Februari 1755 saat ditanda tangani Perjanjian Giyanti tentang pembagian Negara Mataram menjadi dua bagian. Setengah masih tetap menjadi hak Keraton Surakarta dan yang setengah lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi.

Kedua, tanggal 13 Maret 1755, yaitu ketika pembagian kerajaan secara resmi selesai dan Pangeran Mangkubumi bergelar Sultan Hamengku Buwono I. **Ketiga,** tanggal 7 Oktober 1756, yaitu saat Sultan resmi pindah (boyongan) dari Pasanggrahan Ambar Ketawang kemudian menempati Keraton Kasultanan Yogyakarta. Dari tiga peristiwa itu ternyata yang dipilih untuk dijadikan hari lahir Kota Yogyakarta adalah tanggal **7 Oktober,** saat Sultan resmi menempati Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Kunjungan Pelajar di Museum Batik Kuno Danar Hadi

Hari Anak Nasional

Di antara sekian pendekatan dalam menentukan "Hari" itu, yang unik dan menarik adalah penentuan "Hari Anak Nasional". Penetapan "hari" itu tidak dilatarbelakangi oleh sejarah atau peristiwa yang berkaitan dengan anak seperti "hari-hari" yang lain. Penetapan "Hari Anak Nasional" bermula dari gagasan Presiden Soeharto, yang melihat anak-anak sebagai aset kemajuan bangsa, dan untuk itu perlu mendapatkan perhatian khusus secara nasional. Untuk itu mulai tahun 1984 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984, ditetapkan setiap tanggal 23 Juli (1984) sebagai "Hari Anak Nasional". Ini berarti "hari penting" itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan "anak sebagai aset kemajuan bangsa" tanpa didasari latar belakang sejarah yang berkaitan dengan anak.

Hari Sosial Nasional

Lain lagi dengan penentuan "Hari Sosial Nasional". Penentuan "hari" itu didasarkan pada saat pembuatan lambang untuk para pekerja sosial yang rela mengabdikan diri untuk membantu sesama secara tulus. Pada tanggal 19 Desember 1950 para pejabat Jawatan Sosial mengadakan rapat dan lahirlah ide untuk membuat lambang sebagai manifestasi tugas pengabdian. Jadilah lambang "Adicita Pekerjaan Sosial", dan selanjutnya pada rapat tanggal

Suasana di Lingkungan Museum Keraton Yogyakarta

20 Desember(1950) langsung ditetapkan sebagai lambang pekerja sosial. Peristiwa yang sederhana ini oleh Menteri Sosial Muljadi Djojomartono (tanggal 20 Desember 1958), tanggal 20 Desember ditetapkan sebagai "Hari Sosial".

Yang menarik lagi, ternyata nama "hari" ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 20 Desember 1974, oleh Menteri Sosial Mintaredja, S.H., namanya diganti menjadi "Hari Kebaktian Sosial". Ketika Menteri Sosial dijabat oleh Sapardjo, mulai tanggal 20 Desember 1978 nama itu diganti lagi menjadi "Hari Kebaktian Sosial Nasional" (HKSN). Enam tahun kemudian (1984) namanya diganti lagi menjadi "Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional" dengan singkatan tetap, yaitu HKSN.

Prof. Dr. Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) Waktu Menandatangani Prasasti Peresmian Museum Negeri Provinsi Aceh (Nangro Aceh Darussalam) Tahun 1979.

Hari Museum Indonesia

Dari beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa dalam pemilihan dan penetapan "hari penting", menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan dasar sebagai peristiwa bersejarah, pendekatan rasa kebangsaan, patriotisme, hari kelahiran tokoh, serta atas pertimbangan yang sederhana saja, yang oleh Prof. Dr. Agus Aris Munandar disebutnya "dipilih secara mana suka (arbitrer)".

Setelah menyimak berbagai pendekatan dalam pemilihan "hari penting" seperti di atas, kriteria apa yang harus diperdalam memilih "Hari Museum Indonesia"? Secara garis besar, menurut Prof. Dr. Agus Aris Munandar ada beberapa postulat yang mengarah pada pendekatan dalam memilih "Hari Museum Indonesia".

Pertama, "Hari Museum Indonesia" mengacu pada lambang permuseuman di Indonesia. Permuseuman Indonesia memerlukan suatu acuan bersama yang dapat mewakili seluruh lembaga permuseuman dan insan museum di Indonesia. Oleh karena itu, makna pertama yang mengemuka dengan adanya "Hari Museum Indonesia" adalah sebagai lambang, dengan adanya hal itu seluruh permuseuman Indonesia merasa terwakili.

Kedua, "Hari Museum Indonesia" mengacu kepada konsep integrasi permuseuman Indonesia. Makna kedua yang dapat tampil dengan adanya "Hari Museum Indonesia" adalah rasa kebersamaan dan integrasi. Hari Museum Indonesia dapat menjadi faktor pengingkat antarmuseum, tidak ada lagi perbedaan antara museum daerah, museum khusus, museum umum, museum pendidikan, dan sebagainya.

Ketiga, "Hari Museum Indonesia" mengacu kepada upaya peningkatan semangat positif dalam *corporate culture*. Hari Museum Indonesia tidak hanya diartikan sebagai suatu hari jadi yang dapat diperingati setiap tahunnya, tetapi harus dipandang lebih dalam. Hari Museum Indonesia sejatinya mengacu kepada hal yang menjadi inti kemajuan suatu lembaga, yaitu semangat *corporate culture*. Konsep tersebut agak sukar untuk diartikan secara tepat dalam Bahasa Indonesia, namun jika dijelaskan adalah berkenaan dengan etika, daya, karsa, dan karya suatu lembaga untuk terus memperoleh pencapaian yang positif.

Keempat, "Hari Museum Indonesia" mengacu kepada titik awal kronologi (*terminus non ante quem*) permuseuman Indonesia. Hingga sekarang belum ada titik awal dalam membahas sejarah kelahiran permuseuman Indonesia. Padahal tanggal sebagai titik pangkal (terminus non ante quem) itu penting untuk membatasi kronologi sejarah dalam babak tertentu (Gottschalk, 1975: 100). Oleh karena itu, Hari Museum Indonesia perlu untuk ditentukan dan maknanya sebagai titik pangkal kronologi permuseuman (Munandar, 2010).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan "hari" atau "tanggal" peringatan suatu peristiwa dapat dilaksanakan melalui beberapa model pendekatan. Dapat melalui proses yang rumit penuh dengan pertimbangan mendalam dan ada yang dengan pertimbangan sederhana.

Salah Satu Pencapaian Positif dari Sebuah Museum yaitu Museum Batak sebagai Museum Terbaik di Tahun 2014

PROSES DAN HASIL PEMILIHAN HARI MUSEUM INDONESIA

Mungkin proses pemilihan "Hari Museum Indonesia" adalah yang paling lama waktunya dibandingkan dengan pemilihan hari-hari penting yang lain. Sampai dengan dideklarasikannya pada Pertemuan Nasional Museum di Malang tanggal 26 Mei 2015 telah memakan waktu hampir 5 tahun lamanya.

Gambaran singkat dari sekali seminar dan dua kali diskusi itu adalah sebagai berikut.

Hasil Seminar "Hari Museum" di Yogyakarta (2010)

Seperti dikutip di bagian depan, menurut Dra. Intan Mardiana, M. Hum. (Direktur Permuseuman), *"Kalau Hari Museum Internasional setiap 18 Mei, maka untuk Indonesia akan dirumuskan apakah berdasarkan penanggalan berdirinya museum yang tertua di Indonesia atau ada hal lain"* (*Kompas*, 18 April 2009). Untuk menemukan kesepakatan tentang "Hari Museum Indonesia", di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta pada tanggal **22-23 Mei 2010** diadakan "Seminar Hari Museum".

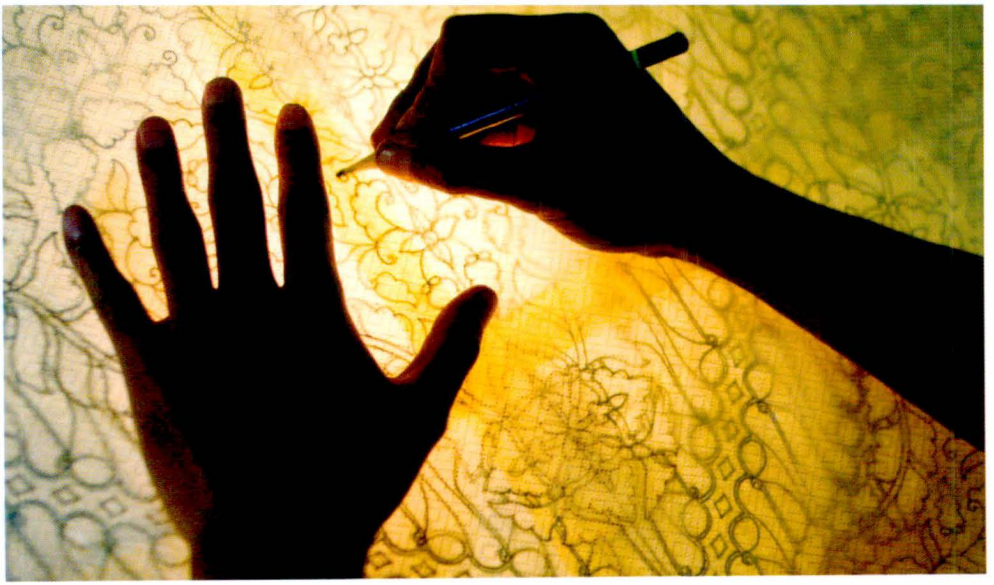

Sosialisasi Gerakan Nasional Cinta Museum Melibatkan Duta Museum

Selain dari tujuan itu, diselenggarakannya seminar itu juga dalam rangka *International Museum Day* 2010, dan mensukseskan Gerakan Nasional Cinta Museum 2011-2014 dan Tahun Kunjung Museum 2010. Sebagai pembicara adalah: (1) Prof. Dr. Edi Sedyawati; (2) Prof. Dr. Djoko Suryo; (3) Drs. Nunus Supardi; (4) Prof. Dr. Agus Aris Munandar; (5) Dr. Daud Aris Tanudirjo; dan (6) Drs. Luthfi Asiarto. Peserta seminar adalah para budayawan, Museawan, para Kepala Museum, pengurus AMI, Badan Musyawarah Musea (BARAHMUS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Himpunan Museum Bali (HIMUSBA), dll.

Dari seluruh paparan yang disampaikan para pemakalah dapat dipilah menjadi tiga hal pokok. *Pertama*, membahas mengenai keberadaan museum dalam kehidupan suatu bangsa, visi, misi, fungsi, dan perannya. Isi museum merupakan contoh-contoh penting dari pencapaian di bidang kebudayaan dan peradaban dari bangsa Indonesia yang dapat dijadikan sumber belajar, menumbuhkan kebanggaan, cinta Tanah Air, dan sumber rekreasi.

Museum tidak hanya dilihat dari sisi keanekaragaman koleksi tinggalan budaya berbagai suku bangsa yang dipamerkan saja. Memang, di berbagai museum di Indonesia koleksi museum mencerminkan adanya persamaan dan perbedaan perlu dipikirkan untuk dapat berfungsi sebagai sarana "persatuan dalam perbedaan". Tetapi di balik itu, peristiwa mendirikan suatu museum juga memiliki nilai penting dalam sejarah dan budaya bangsa.

Kedua, membahas mengenai latar belakang dan tujuan tentang perlu dipilihnya "Hari Museum Indonesia". Untuk sebuah bangsa besar seperti Indonesia yang bersifat multietnik, multikultur, dan multimental, dan banyak memiliki tinggalan budaya yang disimpan di banyak museum, maka adanya "Hari Museum Indonesia" dinilai sangat penting. Lebih-lebih kini Indonesia tengah mengembangkan berbagai museum. Perlu ada "hari" khusus untuk dijadikan hari yang mampu menggerakkan dan menumbuhkan minat masyarakat untuk mengenal, memahami, mencintai, dan selanjutnya memanfaatkan museum.

Koleksi Terakota di Pusat Informasi Majapahit

Dunia permuseuman Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam hal pemanfaatannya, yaitu bagaimana museum tidak hanya sebagai tempat rekreasi tetapi juga sebagai tempat belajar. Melalui program "Hari Museum Indonesia" diharapkan akan menjadi media untuk memberdayakan keberadaan museum, mengundang partisipasi masyarakat dengan program yang variatif. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana dengan "Hari Museum Indonesia" dapat mengundang perhatian dari para pengambil keputusan (Supardi, 2010: 2).

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Edi Sedyawati agar museum-museum dapat berfungsi sebagai sarana "persatuan dalam perbedaan" perlu dipenuhinya prasyarat adanya jejaring yang kuat antara semua museum di Indonesia (Sedyawati, 2010). Atas dasar itulah perlu dipikirkan adanya "Hari Museum Indonesia" yang dapat berperanan dalam meningkatkan kinerja dan kerja sama insan permuseuman.

Ketiga, makalah yang secara jelas berisi usulan "tanggal" dari peristiwa penting di lingkungan permuseuman yang layak untuk diangkat sebagai pilihan "Hari Museum Indonesia". Dari usul-usul tersebut dapat dicatat bahwa berbagai peristiwa di lingkungan museum di Indonesia, apapun bentuk, ragam, dan coraknya sebenarnya adalah peristiwa di bidang museum yang pantas untuk dipilih menjadi "Hari Museum Indonesia". Oleh karena itu tidak mengherankan apabila dalam sesi diskusi seminar banyak muncul "tanggal" usulan berdirinya sejumlah museum untuk dijadikan alternatif pilihan.

Nama-nama museum itu antara lain:
(1) Museum BGKW (Museum Nasional);
(2) Museum Sonobudoyo;
(3) Museum Radya Pustaka;
(4) Museum Bali;
(5) Museum Zoologi Bogor;
(6) Museum Mojokerto; dan
(7) Museum Trowulan.

Selain itu juga ada yang mengusulkan tanggal dibentuknya Bagian Urusan Museum, Jawatan Kebudayaan sebagai urutan ke-8.

Untuk mengerucutkan berbagai usulan "tanggal" tersebut dibentuklah Tim Perumus. Tugasnya menentukan kriteria dan melakukan penyaringan dari sejumlah alternatif tersebut. Tim Perumus antara lain terdiri dari Prof. Dr. Edi Sedyawati, Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Agus Aris Munandar, Dr. Daud Aris Tanudirjo, Dr. Endang Sri Hardiati,

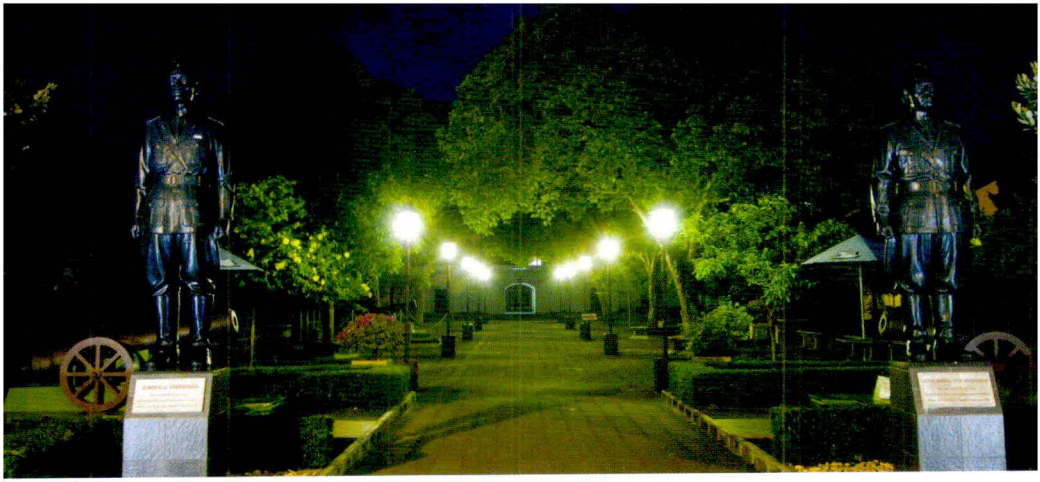

Museum Benteng Vredeburg

Drs. Nunus Supardi, Drs. Luthfi Asiarto, Dra. Intan Mardiana, M.Hum., dan Sdr. Thomas Harjonegoro.

Akhirnya, Tim Perumus menyepakati tiga kriteria untuk melakukan seleksi. Pertama, "tanggal" tersebut berkenaan dengan pembangunan museum di suatu daerah tertentu, dan secara kronologis mempunyai masa yang tua. Kedua, "tanggal" tersebut mengacu kepada masa setelah kemerdekaan Indonesia, setelah bangsa Indonesia yang merdeka menyadari akan perlunya lembaga museum dalam kebudayaannya. Ketiga, "tanggal" tersebut secara filosofi dapat di pandang sebagai pengikat dan penyatu berbagai museum di Indonesia, karena peristiwa penting yang dikandungnya.

Berdasarkan pada tiga kriteria dasar tersebut di atas maka berhasil ditentukan sejumlah "tanggal" yang berhubungan dengan sejarah perkembangan museum di Indonesia untuk dijadikan alternatif bagi penentuan "Hari Museum Indonesia". Hasilnya, disepakati ada 4 alternatif yang dapat dijadikan "Hari Museum Indonesia" untuk dilaporkan ke sidang pleno, yaitu: (1) Berdirinya Museum BGKW (**24 April 1778**); (2) Berdirinya Museum Radya Pustaka (**28 Oktober 1890**); (3) Berdirinya Museum Sonobudoyo (**6 November 1935**); dan (4) Berdirinya Bagian Urusan Museum, Jawatan Kebudayaan, Kementerian PP & K (**24 Desember 1957**).

Hasil Tim Perumus tersebut setelah dilaporkan pada sidang pleno mendapatkan berbagai tanggapan dan saran peserta. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, akhirnya disepakati dua hal. Pertama, menerima usul baru agar "Seminar Hari Museum tanggal 23 Mei (2010) di Museum Benteng Vredeburg" diterima juga sebagai salah satu alternatif pilihan. Kedua, menyepakati 3 kriteria baru untuk menyaring dan menghasilkan satu tanggal. Tiga kriteria itu sebagai berikut:

(1) Memiliki nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan;
(2) Memiliki nilai dalam menumbuhkan kebanggaan secara nasional, dan;
(3) Merupakan gagasan orang Indonesia.

Setelah disaring melalui tiga kriteria tersebut, lima alternatif pilihan tersebut mengerucut seperti tampak dalam tabel berikut:

PENYARINGAN ALTERNATIF
"HARI MUSEUM INDONESIA"

MUSEUM/ KEGIATAN	TANGGAL PERISTIWA	PENGEMBALIAN ASPEK KEILMU-AN	MENUMBUHKAN KEBANGGAN NASIONAL	GAGASAN ORANG INDONESIA
Museum BGKW	24 April 1778 (Pra Kemerdekaan)	√	x	x
Museum Radya Pustaka	28 Oktober 1890 (Pra Kemerdekaan)	√	x	√
Museum Sonobudoyo	06 November 1935 (Pra Kemerdekaan)	√	x	√
Pembentukan Urusan Museum	24 Desember 1957 (Kemerdekaan)	√	√	√
Seminar Hari Museum	23 Mei 2010 (Kemerdekaan)	x	x	√

Keterangan : tanda v = diterima
x = tidak diterima

Dari dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Tanggal hari terbentuknya Museum Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (24 April), Museum Radya Pustaka (28 Oktober), Museum Sonobudoyo (6 November), dan Penyelenggaraan Seminar Hari Museum (23 Mei) dinilai tidak sejalan dengan kriteria dan dinyatakan gugur.
2. Tanggal 24 Desember yang dinilai dapat memenuhi semua dasar, argumentasi dan kriteria yang ditentukan.

Meskipun telah dilakukan penilaian berdasarkan kriteria dan hasilnya seperti tersebut di atas, tetapi dari kalangan peserta masih ada yang belum dapat menerima. Setelah melalui perdebatan, akhirnya diambil kesepakatan pemilihan dilangsungkan melalui pungutan suara *(voting)* terhadap lima alternatif "Hari Museum Indonesia" seperti disebutkan di atas. Untuk memudahkan pemilihan masing-masing diberi kode dengan urutan sebagai berikut:

- Kode A: Tanggal **24 April**, berdirinya BGKW;
- Kode B: Tanggal **6 November**, berdirinya Museum Sonobudoyo;
- Kode C : Tanggal **28 Oktober,** berdirinya Museum Radya Pustaka;
- Kode D : Tanggal **24 Desember** dibentuknya Bagian Urusan Museum pada Jawatan Kebudayaan Kementerian PP dan K; dan
- Kode E: Tanggal **23 Mei** diselenggarakannya Seminar Hari Museum.

Setelah dihitung, kartu suara sah yang masuk sebanyak 57 kartu, dengan urutan jumlah suara sebagai berikut: Kode A, mendapatkan 3 suara; Kode B mendapatkan 4 suara; Kode C mendapatkan 6 suara; Kode D mendapatkan 24 suara; dan Kode E mendapatkan 20 suara. Dengan demikian tanggal **24 Desember** yang akan diusulkan untuk ditetapkan sebagai **"HARI MUSEUM INDONESIA".**

Kalau dilihat dari latar belakang sejarahnya, pilihan tanggal **24 Desember (1957)** sebagai "Hari Museum Indonesia" lebih terkait dengan sejarah kelembagaan kebudayaan dalam pemerintahan. Pada 1957 di lingkungan Kementerian PPdan K dilakukan reorganisasi. Perubahan itu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PP dan K Sarino Mangunpranoto No. 2778/S tanggal 13 Maret 1957. Perubahan itu mulai berlaku tanggal 15 Maret 1957 Jawatan Pengajaran dipecah menjadi dua, yaitu (1) Jawatan Pendidikan Umum dan (2) Jawatan Pendidikan Kejuruan. Sementara itu, jawatan lain yang masih dipertahankan adalah (3) Jawatan Pendidikan Masyarakat (lama); (4) **Jawatan Kebudayaan** (lama); dan (5) Jawatan Perguruan Tinggi (sebelumnya Biro Perguruan Tinggi). Unit Jawatan Kebudayaan inilah tempat bernaung unit-unit kerja yang mengurus kebudayaan beserta unsur-unsurnya.

Pada 10 April 1957 dilangsungkan serah terima jabatan dari Menteri PP dak K lama Sarino Mangunpranoto kepada Prof. Dr. Prijono. Perubahan pimpinan itu diikuti pula dengan perubahan organisasi. Berdasarkan SK PP dan K No. 130433/S tanggal 24 Desember 1957, struktur organisasi Jawatan Kebudayaan dibagi menjadi

(1) Urusan Kesenian;
(2) Urusan Adat-Istiadat dan Cerita Rakyat;
(3) Urusan Taman Kebudayaan;
(4) **Bagian Urusan Museum**;
(5) Urusan Pendidikan Tenaga; dan
(6) Urusan Tata Usaha (Supardi, 2013: 178).

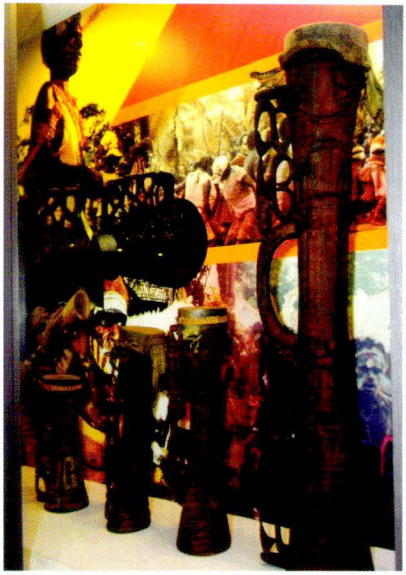

Koleksi di Museum Asmat

Pada saat itu lahirnya **Bagian Urusan Museum** itu disambut gembira karena sudah lama dicita-citakan oleh kalangan permuseuman. Cita-cita itu tahun 1957 pernah disampaikan oleh Panitia Pembantu Penyelenggara Museum Sonobudoyo dan Pengurus Yayasan Paheman Radya Pustaka Surakarta. Kedua lembaga itu telah mengirimkan selebaran untuk mengusulkan agar Pemerintah membentuk badan tersendiri khusus mengurus dan mengawasi permuseuman. Dengan dibentuknya Urusan Museum maka dunia permuseuman menaruh harapan Pemerintah akan meningkatkan keberadaan lembaga museum di Indonesia. (Sutaarga, 1962: 26)

Menurut Luthfi Asiarto, lahirnya **Bagian Urusan Museum** itu kemudian berkembang menjadi Direktorat Museum, Direktorat Permuseuman, di bawah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Asiarto, 2010: Slide ke-10). Kini, menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan dipilihnya tanggal **24 Desember** sebagai "Hari Museum Indonesia" menunjukkan bahwa pemilihan tidak dirumuskan berdasarkan penanggalan berdirinya museum yang tertua di Indonesia. Seperti dikatakan oleh Dra. Intan Mardiana, M.Hum., pilihan itu dapat didasarkan atas "ada hal lain", dan "hal lain" itu adalah berdirinya satuan kerja **Bagian Urusan Museum** tanggal 24 Desember 1957 yang akan mengurus museum.

Dari gambaran sekilas di atas menunjukkan bahwa pemilihan "Hari Museum Indonesia" di Yogyakarta telah berlangsung melalui proses musyawarah dan demokratis. Untuk merealisasikan pilihan "tanggal" itu menjadi sebuah ketetapan untuk dideklarasikan dibentuk Tim Naskah Akademik diketuai oleh Prof. Dr. Agus Aris Munadar. Draf Naskah Akademik telah diselesaikan tahun 2010 itu juga, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Arca Ganesa di Museum Nasional

Hasil Sosialisasi dan Diskusi "Hari Museum Indonesia" di Museum Kebangkitan Nasional (2014)

Sayang, hasil seminar yang demikian penting itu tidak cepat ditindaklanjuti.

Sudah 5 tahun lamanya hasil seminar itu tidak segera ditetapkan. Bukan belum disampaikan kepada pimpinan tetapi pihak pimpinan masih menimbang-nimbang. Tampaknya, Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala, Ir. Aurora Tambunan (Almarhumah) saat itu, belum dapat menyetujui hasil Seminar Sehari di Yogyakarta.

Baru tahun 2014 perhatian terhadap "Hari Museum Indonesia" mulai muncul lagi. Sebagai tindak lanjut dan sekaligus mendapatkan masukan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tanggal 24 Desember 2014 menyelenggarakan sosialisasi dan diskusi tentang "Hari Museum Indonesia", yang telah disepakati pada seminar di Yogyakarta. Acara itu diselenggarakan di Museum Kebangkitan Nasional. Selain Drs. Dani Wigatna memaparkan perkembangan hasil seminar di Yogyakarta, juga tampil narasumber Prof. Dr. Agus Aris Munandar dan Drs. Nunus Supardi, dipandu oleh Drs. Luthfi Asiarto. Ketiga narasumber pada intinya hanya mengulang hasil seminar di Yogyakarta, dan menawarkan saran untuk mempercepat penetapan "Hari Museum Indonesia".

Sebagian dari peserta adalah peserta baru, sehingga muncul pertanyaan tentang pilihan tanggal 24 Desember sebagai "Hari Museum Indonesia". Pertanyaan yang sudah dibahas di Yogyakarta, muncul lagi, khususnya tentang pilihan tersebut. Mereka menilai dilihat dari segi waktu dan teknis pelaksanaan kurang tepat. Tanggal itu mendekati akhir tahun, yang berarti tahun memasuki saat-saat sibuk. Selain itu, berdekatan waktunya dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi penyediaan anggaran, dikhawatirkan akan menghadapi kesulitan. Biasanya semua instansi sibuk menyiapkan tutup tahun anggaran, sehingga tidak ada sisa dana. Dilihat dari sisi teknis penyelenggaraan dikhawatirkan perhatian masyarakat terhadap acara peringatan akan kecil karena masyarakat sedang sibuk menghadapi hari besar Natal dan Tahun Baru.

Selain mempermasalahkan hal-hal di atas, diskusi di Museum Kebangkitan Nasional juga menyarankan agar mekanisme peresmian "Hari Museum Indonesia" sebaiknya mengikuti model Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) saja. MSI telah menetapkan tanggal **14 Desember** sebagai **"Hari Sejarah"** dengan cara yang cukup mudah dan cepat. Seperti diberitakan di harian Kompas, 8 Mei 2014, **"Hari Sejarah Indonesia"** dideklarasikan dalam acara Pertemuan Apresiasi Historiografi Indonesia yang berlangsung dari tanggal 5-8 Mei 2014 di Yogyakarta. Acara itu dihadiri sekitar 120 sejarawan peserta Apresiasi Historiografi dengan cara menandatangani teks deklarasi.

Para Narasumber dalam Diskusi Permuseuman "Hari Museum Indonesia" (Sumber: Dokumen Museum Kebangkitan Nasional)

Diskusi Ke-3 dengan Tema "Penetapan Hari Museum Indonesia"

FINALISASI PEMILIHAN HARI MUSEUM INDONESIA

Meskipun sudah dilakukan diskusi yang kedua di Museum Kebangkitan Nasional, masalah pilihan tanggal 24 Desember sebagai "Hari Museum Indonesia" belum menunjukkan titik final. Dalam rapat persiapan "Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia" di Malang tanggal 26-28 Mei 2015, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyebutkan akan dideklarasikan "Hari Museum Indonesia" yang hampir lima tahun tertunda.

Karena masalah pilihan tanggal "Hari Museum Indonesia" masih mengundang pro dan kontra, maka untuk melempangkan jalan, diputuskan untuk diadakan diskusi sekali lagi. Diskusi akan memfinalkan pilihan dari hasil seminar di Yogyakarta tahun 2010 maupun dalam diskusi di Museum Kebangkitan Nasional tahun 2014. Kekhawatiran terhadap pilihan tanggal 24 Desember sebenarnya bukan karena alasan tanggal itu tidak memiliki makna sejarah bagi permuseuman Indonesia, melainkan lebih didasarkan pada pertimbangan dari segi waktu dan teknis pelaksanaan peringatan "Hari Museum Indonesia".

Diskusi ke-3 untuk memfinalkan pilihan, diselenggarakan pada tanggal 23 April 2015 di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan tema "Diskusi Penetapan Hari Museum Indonesia". Diskusi dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, narasumber, beberapa kepala museum, Pengurus AMI Pusat dan AMI Daerah (AMIDA), BARAHMUS DIY, Paramita Jaya Jakarta, Himpunan Museum Bali (HIMUSBA), serta para penggiat museum.

Perkembangan Hasil Pemilihan

Dalam diskusi itu Prof. Dr. Agus Aris Munandar sebagai Ketua Tim Naskah Akademik "Hari Museum Indonesia" menyampaikan penjelasan mengenai latar belakang dan hasil yang dicapai dalam seminar dan diskusi sebelumnya. Dari seminar di Yogyakarta dihasilkan beberapa pilihan "tanggal", seperti dapat dilihat di dalam Tabel "Penyaringan Alternatif Hari Museum Indonesia". Sesuai hasil penilaian empat alternatif dinyatakan gugur, dan tanggal **24 Desember** disepakati untuk dipilih sebagai "**HARI MUSEUM INDONESIA**".

Selanjutnya Prof. Dr. Agus Aris Munandar menjelaskan bahwa pilihan tanggal **24 Desember** sebagai "Hari Museum Indonesia" ternyata masih mengundang berbagai pendapat dan pertanyaan seperti telah dipaparkan di atas. Dilihat dari segi waktu dan teknis pelaksanaan peringatan Hari Museum Indonesia, "tanggal" itu dinilai kurang tepat karena mendekati akhir tahun, Hari Raya Natal, dan Tahun Baru.

Kekhawatiran yang masih tetap muncul itu patut dijadikan bahan renungan kembali, karena secara formal "tanggal 24 Desember" sebagai "Hari Museum Indonesia" belum dideklarasikan. Masih ada peluang untuk mencari "tanggal" lain yang memiliki arti penting bagi sejarah permuseuman Indonesia, dan dapat diterima oleh seluruh insan museum secara bulat.

Menurut istilah Prof. Dr. Agus Aris Munandar permasalahan itu disebutnya sebagai "epilog", dan oleh sebab itu sebelum dilakukan pendeklarasian, sebaiknya dapat didiskusikan kembali untuk diterima atau ditolak. Selain itu juga dibuka peluang untuk diajukan usulan "tanggal" yang baru, dengan tidak mengabaikan parameter lama untuk menguji usulan baru itu.

Ditawarkan oleh Prof. Dr. Agus Aris Munandar tiga hal yang dapat dijadikan dasar penentuan. Pertama, didasarkan pada awal berdirinya suatu museum, dengan demikian dapat disebut sebagai "Hari Museum Indonesia". Kedua, pertemuan akbar tentang perkembangan dunia museum di Indonesia, dengan demikian dapat disebut sebagai "Hari Kelembagaan Museum". Ketiga, peristiwa lainnya yang dipilih secara mana suka (arbitrer).

Tawaran Baru

Sesuai dengan paparan Prof. Dr. Agus Aris Munandar bahwa dapat "diajukan tanggal baru" untuk dijadikan sebagai alternatif pilihan baru, narasumber kedua, Drs. Nunus Supardi, menawarkan pilihan baru. Usulan itu ditujukan semata-mata untuk mendapatkan jalan keluar agar didapatkan "tanggal" yang dapat diterima secara bulat. Dasarnya selain pilihan tanggal **24 Desember** masih mengundang kekhawatiran karena adanya kendala waktu dan teknis, pilihan "tanggal" itu belum dinyatakan sebagai pilihan yang final. Selain itu, ia juga tidak mengusulkan untuk memilih salah satu dari empat nominasi yang lain hasil seminar di Yogyakarta, karena keempat nominasi itu telah dinyatakan gugur pada seminar di Yogyakarta.

Peristiwa penting yang ditawarkan masih sekitar dunia permuseuman Indonesia yang tampaknya luput dari perhatian rekan-rekan di lingkungan museum sendiri, sehingga tidak sempat muncul dalam seminar di Yogyakarta maupun di acara diskusi di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta. Sebagaimana banyak ditulis orang, setelah 17 tahun Indonesia merdeka (60-an), perhatian terhadap perkembangan permuseuman Indonesia mulai menggeliat. Salah satu bentuk perhatian itu adalah datangnya gagasan dari sejumlah tokoh, pendiri dan pemerhati museum untuk menyelenggarakan **Musyawarah Museum se-Indonesia (MMI)** yang pertama. Acara Musyawarah itu diselenggarakan pada tanggal **12-14 Oktober 1962** di Yogyakarta.

Pencapaian Resolusi Ke-9 Misalnya Batik Sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda Menunjukkan Fungsi Kultural Museum Batik Kuno Danar Hadi Sebagai Wadah Untuk Preservasi

Museum Konferensi Asia Afrika Menunjukkan Pencapaian Resolusi Ke-10

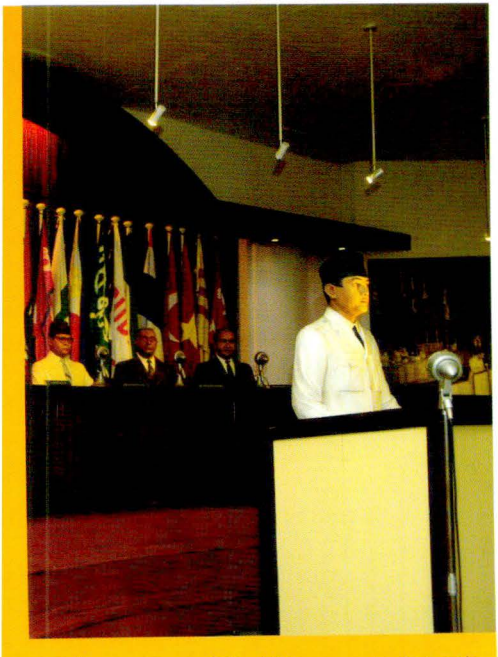

MMI pertama itu dihadiri sekitar 40 orang, dari unsur pimpinan dan tokoh museum, pemerhati dan pencinta museum. Setelah bersidang mulai tanggal 12-14 Oktober 1962 membahas masalah-masalah pokok yang sedang dihadapi oleh permuseuman nasional, 1965 di Jakarta; (7) Pembinaan dan pendidikan macam-macam tenaga museum, melalui kursus-kursus aplikasi, *upgrading-courses* dan menyokong pikiran pendirian suatu akademi dinas di bidang museologi; (8) Perlu memasukkan pelajaran museologi dalam kurikulum universitas; (9) Supaya museum diberi fungsi-fungsi sosial, pedagogis, dan kultural yang aktif dalam rangka usaha menuju masyarakat sosialis Indonesia; (10) Supaya museum dijadikan alat penggalang persahabatan bangsa-bangsa serta membantu perkembangan kebudayaan dunia.

Arca di Museum Nasional

Bertolak dari penyimakan sepintas terhadap nilai dan arti yang terkandung dalam peristiwa MMI pertama yang terjadi 53 tahun yang lalu itu, narasumber mengusulkan alternatif baru untuk dijadikan "Hari Museum Indonesia". Tetapi sebelum dikaji lebih lanjut, ada baiknya dikutip Drs. Amir Sutaarga yang saat itu menjabat Kepala Museum Pusat (sebelumnya bernama Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia atau Museum LKI). Menurut Amir Sutaarga, Musyawarah Museum I tahun 1962 itu telah menyampaikan sejumlah resolusi penting yang menjadi tonggak sejarah museum di Indonesia. Masih menurut Amir Sutaarga sebagai "Bapak Permuseuman Indonesia", sepuluh resolusi MMI pertama itu menjadi landasan kerja pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) untuk pembinaan dan pengembangan museum di Indonesia (Sutaarga, 1973: 15-16).

Bila bertolak dari pendapat Amir Sutaarga itu, kemudian satu persatu sepuluh resolusi itu dikaji dari sudut dampak positif yang ditimbulkan, maka akan tampak betapa kuat nilai strategis dan historisnya bagi kemajuan permuseuman di Indonesia. Gambaran tentang dampaknya terhadap perkembangan museum hingga saat ini adalah sebagai berikut.

Pertama, resolusi tentang perlunya undang-undang tentang permuseuman. Memang belum ada undang-undang khusus tentang permuseuman, tetapi untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permuseuman di Indonesia telah ditampung di dalam Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995, tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. Kehadiran peraturan pemerintah ini sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka peraturan pemerintah yang lama harus diganti dengan yang baru. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum kini telah diterbitkan sementara mengenai resolusi perlunya undang-undang tentang "monumen"sudah terwujud, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Kedua, mengenai resolusi pembentukan Badan Musyawarah Museum Indonesia. Meskipun agak terlambat, tetapi 9 tahun kemudian para pengelola museum terus berusaha untuk mewujudkannya. Pada tanggal 7 Agustus 1971 secara *de facto* dan *de jure* di Yogyakarta berdiri organisasi **Badan Musyawarah Musea (BARAHMUS)** Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Organisasi ini mulai digagas dan dirintis mulai tanggal 21 Juli 1971 dalam suatu pertemuan di Museum Dewantara Kirti Griya, Taman Siswa, Yogyakarta. Pada awal berdirinya anggota yang bergabung sebanyak 10 museum, dan pada tahun 2007 anggota BARAHMUS DIY berjumlah menjadi 27 museum.

Selain berdiri BARAHMUS DIY, di Jakarta berdiri organisasi museum **Paramita Jaya**, sekitar tahun 1980-an. Sementara itu, di Bali berdiri **Himpunan Museum Bali**, disingkat **HIMUSBA** juga sebagai wadah berkumpulnya museum-museum yang ada di Bali. Pada periode 2012-2017 **HIMUSBA** dipimpin Anak Agung Gde Rai, pendiri Museum ARMA.

Sebagai catatan penting lainnya, BARAHMUS DIY juga berperan sebagai "cikal-bakal" terbentuknya organisasi museum tingkat nasional, yang diberi nama **Badan Musyawarah Museum Indonesia (BMMI)**. Berawal dari pemikiran BARAHMUS DIY, pada tanggal 28-29 Agustus 1992 di Bandung diadakan rapat yang dihadiri oleh unsur pimpinan Direktorat Permuseuman, pengurus BARAHMUS, Kepala Bidang Museum, Sejarah dan Purbakala (Muskala), dan undangan lainnya. Rapat menyimpulkan secara bulat untuk membentuk organisasi permuseuman secara nasional. Tujuannya untuk lebih menyatupadukan seluruh potensi museum menuju museum Indonesia yang berkembang maju.

Setelah gagasan itu sempat mengendap selama lima tahun, akhirnya pada tanggal 4 November 1997 atas inisiatif Ki Najono, Ketua BARAHMUS DIY, di Monumen Jogja Kembali diselenggarakan rapat persiapan dihadiri 32 orang. Selanjutnya, dalam rapat tanggal 27 Oktober 1998 yang dihadiri antara lain Drs. Tedjo Susilo, Drs. Luthfi Asiarto, Drs. Nunus Supardi, Ki Najono, Anak Agung Gde Rai dll, sepakat mendirikan **Badan Musyawarah Museum Indonesia (BMMI)**. Peresmian dilaksanakan tanggal 28 Oktober 1998 bersamaan dengan peringatan 70 tahun Sumpah Pemuda.

Pertemuan Nasional Museum Se-Indonesia Tahun 2016 Merupakan Kegiatan di mana Seluruh Organisasi Museum, Pemilik/Pengelola Museum, dan Komunitas Berkumpul dan Berdiskusi Mengenai Permuseuman

Musyawarah Nasional BMMI pertama diselenggarakan di Bali tahun 1999. Musyawarah Nasional kedua diselenggarakan tanggal 12-14 Juli 2004 di Cisarua, Bogor. Musyawarah di Bogor menghasilkan catatan penting, yaitu kesepakatan mengganti nama BMMI menjadi **ASOSIASI MUSEUM INDONESIA (AMI)** sampai sekarang. Pilihan nama baru ini sesungguhnya menyimpang dari gagasan para tokoh museum waktu Musyawarah Museum I, yaitu dengan nama Badan Musyawarah Museum Indonesia.

Tetapi bagaimanapun, kehadiran nama baru "AMI" merupakan suatu kesepakatan bersama yang lahir sesuai dengan dinamika perubahan cara pandang para tokoh museum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan terbukanya hubungan antarbangsa. Yang jelas, AMI merupakan perwujudan dari resolusi kedua Musyawarah Museum I, dan misinya sama dengan BMMI, yaitu sebagai wadah bertemunya semua museum di Indonesia untuk bersama-sama memajukan museum di Indonesia.

Resolusi kedua itu juga menunjukkan betapa luas dan jauhnya pemikiran para tokoh museum saat itu, dalam menyongsong perkembangan zaman. Dapat dikatakan seluruh negara kini telah memiliki organisasi seperti AMI. Sekedar contoh di China ada Chinese Society of Museums, Columbia memiliki Asociación Colombiana de Museos, di India ada Museums Association of India, Jepang dengan Nihon Hakubutsukan Kyōkai/ Japanese Association of Museums, serta Korea Selatan memiliki The Korean Museum Association, dll.

Selain telah berdiri organisasi museum seperti disebut di atas, seiring dengan tumbuhnya kecintaan masyarakat terhadap museum, tumbuh pula minat masyarakat untuk membentuk organisasi yang menjadi "forum" berkumpulnya para pecinta museum. Mereka menyatu dalam komunitas yang bersifat tidak mencari keuntungan *(non-profit)* dan dengan sukarela dan gotong-royong menyelenggarakan berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat dalam membantu menyemarakkan museum.

Sebagai contoh, telah berdiri komunitas "Sahabat Museum" disingkat "BATMUS". Anggotanya terdiri atas anak-anak muda, remaja dan juga orang dewasa yang kegiatannya antara lain menjelajahi museum-museum di Jakarta dan luar Jakarta. Contoh lain adalah "Komunitas Jelajah" disingkat "KOMJEL". Komunitas ini juga menghimpun anak, remaja dan orang dewasa yang memiliki kepedulian terhadap museum. Komunitas ini telah membangun kerja sama dengan beberapa komunitas di daerah menjelajahi berbagai museum di Indonesia. Tujuannya juga membantu menyemarakkan keberadaan museum dengan berbagai aktivitas.

Selain itu, KOMJEL sejak tahun 2012 merambah ke bidang kegiatan yang cukup serius. Mulai tahun itu dilanjutkan dengan tahun 2013 dan 2014 telah menyelenggarakan acara pemberian Anugerah Museum (Purwakalagraha) atau *Museum Award* kepada sejumlah museum yang dinyatakan lulus dari seleksi. Di samping itu juga telah memberikan *"Lifetime Achievement Award"* kepada Drs. Moh. Amir Sutaarga sekaligus memberikan predikat sebagai "Bapak Museum Indonesia" tahun 2012, Prof. Dr. Daoed Joesoef dalam tahun 2013 dan pada tahun 2014 kepada Pande Wayan Suteja Neka, pendiri Neka Art Museum di Ubud, Bali. Ketiga tokoh tersebut dinilai telah banyak jasanya dalam mengembangkan museum di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 2015, KOMJEL juga kembali menggelar acara *Museum Award 2015* dan pemberian penghargaan *"Lifetime Achievement Award"* kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati.

Selain dua contoh komunitas di atas, masih ada beberapa komunitas lain (tahun 2013 berdiri Kelompok Pecinta Museum Indonesia) yang tidak hanya tumbuh di Jakarta tetapi juga di beberapa kota. Juga telah tumbuh komunitas yang menghimpun para penggemar koleksi khusus, seperti Komunitas Perangko, Keramik, Numismatik, Batik dll.

Ketiga, mengenai resolusi pembentukan National Committee of ICOM. Resolusi itu juga telah terwujud dan yang ditunjuk sebagai wakil dari Indonesia adalah Drs. Amir Sutaarga. Sampai sekarang Indonesia masih menjadi anggota ICOM.

Keempat, mengenai desakan agar terutama Pemerintah meningkatkan pemberian bantuan kepada museum-museum yang telah ada. Resolusi itu telah berjalan meskipun sifatnya masih terbatas. Sementara itu, mengenai perhatian dan partisipasi masyarakat khususnya dunia usaha terhadap museum sudah tumbuh meskipun belum optimal.

Kelima, resolusi penambahan jumlah museum. Resolusi yang dicetuskan 50 tahun yang lalu itu telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Bila tahun 1945 Indonesia memiliki 26 museum, dan pada 1966 jumlah museum menjadi sekitar 46 museum, kini menurut data telah mencapai 428 museum. Ini berarti ada kenaikan jumlah yang luar biasa. Meskipun demikian masih perlu terus ditingkatkan, karena jumlah yang ada sekarang belum sebanding dengan jumlah penduduk. Masih tertinggal jauh dengan negara Jepang dan Korea Selatan.

Deklarasi Hari Museum Indonesia

Menurut hasil Survei Pendidikan Sosial Jepang tahun 2005, museum di Jepang dibagi ke dalam 3 klasifikasi, yaitu museum yang dinyatakan sebagai museum (terdaftar), dinyatakan setara dengan museum, dan seperti museum. Yang dinyatakan sebagai museum berjumlah 865 buah, yang secara resmi terdaftar, ditambah dengan 331 buah unit yang menurut penilaian dinyatakan setara dengan museum, dan 4.418 buah unit fasilitas yang seperti museum. Bila seluruhnya dijumlahkan maka Jepang memiliki 5.614 museum. Dengan jumlah penduduk 123.333.002 jiwa (sensus 2009) berarti setiap museum melayani 24.000 jiwa.

Sementara itu, di Korea Selatan dengan jumlah penduduk 48.598.175 jiwa memiliki 57 buah Museum Nasional dan 485 museum provinsi dan pribadi atau seluruhnya berjumlah 542 museum. Ini berarti setiap museum melayani 89.665 jiwa. Bila dibandingkan dengan jumlah museum di Jepang dan Korea Selatan, maka Indonesia hanya memiliki 7,6 % dari jumlah museum Jepang dan 79% dari jumlah museum di Korea Selatan. Sementara itu, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 237.641.326 jiwa (sensus 2010) dengan museum sebanyak 428 museum, berarti satu museum melayani 555.236 jiwa lebih. Jepang 1 museum melayani 24.000 orang dan 1 museum di Korea Selatan melayani 89. 665 jiwa.

Keenam, resolusi agar diadakan Musyawarah Museum Seluruh Indonesia II pada tahun 1965 di Jakarta. Resolusi ini gagal dipenuhi karena telah terjadi peristiwa G30/S PKI. Tampaknya, setelah itu selama bertahun-tahun vakum tidak diselenggarakan musyawarah.

Museum Kota Makassar, Salah Satu Museum yang Direvitalisasi Melalui Dana Tugas Pembantuan

Ketujuh, resolusi tentang pembinaan dan pendidikan macam-macam tenaga museum, melalui kursus-kursus aplikasi, *upgrading-courses* dan menyokong pikiran pendirian suatu akademi dinas di bidang museologi. Semua resolusi itu telah dilaksanakan, kecuali pendirian akademi kedinasan di bidang museologi sampai sekarang belum terwujud. Telah dilaksanakan diklat museum tipe dasar hingga lanjutan, pemberian beasiswa, dan penerapan sistem magang serta kursus-kursus museum.

Kedelapan, resolusi agar museologi masuk dalam kurikulum universitas. Resolusi ini sudah terlaksana, meskipun terlambat. Beberapa Fakultas Ilmu Budaya telah menjadikan ilmu permuseuman menjadi bahan studi para mahasiswa.

Kesembilan, resolusi agar museum secara aktif berfungsi untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama telah berlangsung hingga sekarang. Untuk mensukseskan resolusi tersebut antara ada kebijakan Wajib Kunjung Museum yang pernah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan beberapa Pemerintah Daerah.

Kesepuluh, mengenai resolusi agar museum dijadikan alat penggalang persahabatan bangsa-bangsa serta membantu perkembangan kebudayaan dunia, juga telah banyak dilakukan. Dalam rangka membangun diplomasi bermatra budaya, berbagai pameran koleksi museum di luar negeri telah banyak diselenggarakan, seperti pameran Expo di New York tahun 1964 dan 1965, Expo di Osaka 1974, pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS) 1991, Pameran Kebudayaan Indonesia di Belanda (PAKIB) 1993, Festival Persahabatan Indonesia-Jepang (FPIJ) 1996-1997, dll.

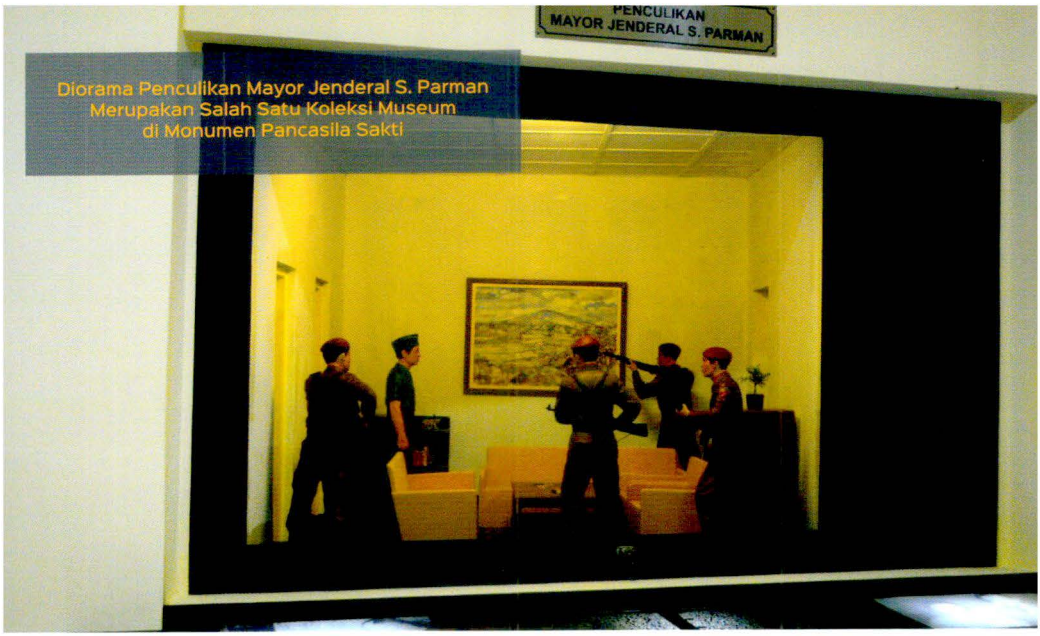

Diorama Penculikan Mayor Jenderal S. Parman Merupakan Salah Satu Koleksi Museum di Monumen Pancasila Sakti

Selanjutnya, mengenai dampak lain dari MMI pertama, dalam hal ini yang berkaitan dengan penataan kelembagaan bidang museum, juga telah menunjukkan hasil. Pada tahun 1964, Menteri PD dan K mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 34 tahun 1964 tentang pembentukan unit kerja sebagai berikut: (1) Museum Pusat; (2) Urusan Museum Perwakilan Daerah; (3) Urusan Museum Regional dan Lokal; (4) Urusan Museum Umum; (5) Urusan Museum Khusus; (6) Urusan Penelitian dan Perencanaan; (7) Urusan Subsidi/Bantuan; (8) Urusan Hubungan Luar Negeri; (9) Urusan Pemeliharaan; (10) Urusan Pendidikan Tenaga; dan (11) Urusan Tata Usaha.

Pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2000, posisi bidang museum dalam status "direktorat" tersendiri masih dapat dipertahankan. Setelah itu beberapa kali mengalami perubahan. Tahun 2001 berubah menjadi Direktorat Purbakala dan Permuseuman, berubah lagi menjadi Asisten Deputi Kepurbakalaan dan Permuseuman (2003), berubah lagi menjadi Direktorat Permuseuman (2005) dan kemudian menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (2011-sekarang).

Dari paparan singkat di atas, menunjukkan bahwa MMI pertama itu telah dijadikan forum untuk menyusun konsep, kebijakan, dan strategi pembangunan museum di Indonesia. Berbagai keberhasilan yang dapat dicapai sekarang ini semuanya bertolak dari sepuluh resolusi tersebut. Bila dilihat dari tiga kriteria hasil Tim Perumus, peristiwa diselenggarakannya MMI pertama itu sangat berkaitan dengan masalah pembangunan museum di Indonesia. Peristiwa diselenggarakannya musyawarah pada masa setelah kemerdekaan Indonesia menunjukkan tumbuhnya kesadaran para tokoh museum tentang perlunya konsep, kebijakan, dan strategi pengembangan museum di Indonesia. Selain itu, bila ditinjau secara filosofi, musyawarah itu dapat dipandang sebagai pengikat dan penyatu berbagai museum di Indonesia, karena peristiwa penting yang dikandungnya.

Jubah Paus Yohanes Paulus II di Museum Katedral

Selanjutnya, bila dilihat dari tiga kriteria hasil sidang pleno, tujuan diselenggarakannya MMI pertama jelas memiliki nilai karena merupakan perwujudan dari tekad dan kedalaman berpikir sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang museum. Kedua, peristiwa diselenggarakannya MMI pertama di zaman sedang susah dan pemerintahan belum stabil, jelas memiliki nilai penting dalam menumbuhkan kebanggaan secara nasional, terutama bagi kalangan insan museum.

Dengan demikian dapat dikatakan MMI pertama itu tidak hanya memberikan indikasi mulai tumbuhnya kesadaran para tokoh tentang perlunya membingkai berbagai museum menjadi satu wadah saja. Peristiwa itu juga menunjukkan telah tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya peraturan perundang-undangan, visi dan misi museum serta adanya landasan kerja, dalam bentuk konsep, kebijakan dan strategi pengembangan museum di Indonesia. Peristiwa itu juga merupakan perwujudan dari besarnya tekad dan kedalaman berpikir sejumlah tokoh museum bumiputra sebagai penanggung jawab terhadap kemajuan museum sebagai "jendela" peradaban bangsanya.

Dari sedikit gambaran di atas menunjukkan bahwa peristiwa MMI pertama di Yogyakarta tanggal **12 Oktober 1962** memiliki nilai sejarah yang penting bagi dunia permuseuman

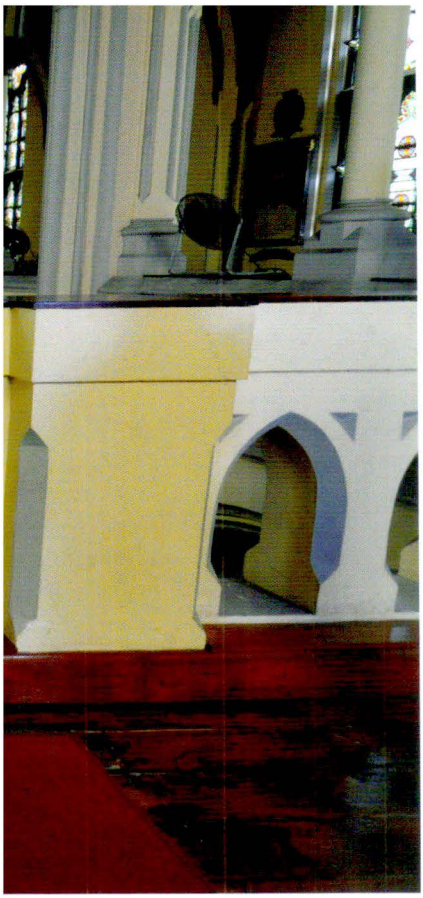

Indonesia. Oleh karena itu menurut nus Supardi peristiwa yang terjadi pada i **Jumat Legi** itu patut dipilih untuk adikan sebagai"**Hari Museum Indonesia**". berarti pilihan "Hari" atau "Tanggal" itu nar-benar lahir dari rahim museum dan an museum. Kalau "Bapak Museum lonesia" Moh. Amir Sutaarga mengatakan iseum adalah "**milik rakyat, dari rakyat, n untuk rakyat**", maka "Hari Museum lonesia tanggal 12 Oktober" dapat atakan lahir **"dari museum, oleh museum, n untuk museum"** (Sutaarga, 1973: 17).

Kesepakatan Final

Dengan paparan dua narasumber seperti diuraikan di atas, maka diskusi mengarah pada masalah pokok, yaitu pemilihan salah satu diantara dua pilihan, tanggal "24 Desember" atau tanggal "12 Oktober". Tampaknya dua tanggal ini memiliki bobot yang sama. Dua-duanya memiliki nilai dan peran yang penting dalam perjalanan sejarah permuseuman di Indonesia. Untuk alternatif tanggal "24 Desember" kalau menurut istilah Prof. Agus dapat disebut sebagai "Hari Kelembagaan Museum" karena peristiwa yang terjadi pada tanggal itu berkaitan dengan lahirnya lembaga di lingkungan pemerintah yang secara khusus akan mengurus museum, yaitu Bagian Urusan Museum.

Sementara itu, untuk alternatif kedua tanggal **"12 Oktober"**, kalau mau meminjam istilah Prof. Agus dapat dikatakan sebagai "Hari Museum Indonesia", tetapi bukan dalam arti tanggal itu dipilih karena berdirinya suatu museum. Tanggal "12 Oktober" dapat disebut sebagai "Hari Museum Indonesia" karena pada tanggal itu telah tumbuh semangat para tokoh museum, pengelola dan penggiat museum untuk bermusyawarah yang kemudian melahirkan suatu landasan kerja dalam bentuk konsep, kebijakan, dan strategi pengembangan museum di Indonesia.

Karena pembahasan dalam diskusi mengenai kedua "tanggal" itu cukup lama dan belum mendapatkan tanda-tanda lahirnya kesepakatan, maka situasi itu memunculkan usulan tanggal lain untuk dijadikan pilihan. Ada tiga usulan baru yang muncul.

Usulan baru pertama (1) adalah tanggal **29 Februari** (1950) yaitu saat lahirnya Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) yang semula bernama Museum BGKW. Mengingat tanggal itu merupakan tahun kabisat, maka jika tanggal itu dipilih sebagai "Hari Museum Indonesia" maka peringatannya akan berlangsung empat tahun sekali. Jalan keluar untuk mengatasi hal itu diusulkan pelaksanaan perayaan dapat dilaksanakan tanggal 28 Februari atau tanggal 1 Maret setiap tahun.

Usul baru kedua (2) adalah tanggal **5 Maret** (1928), yaitu hari lahirnya Drs. Moh. Amir Sutaarga sebagai tokoh permuseuman dan "Bapak Museum Indonesia". Usulan itu mengikuti model ditetapkannya Hari Pendidikan Nasional berdasarkan hari lahir Ki Hadjar Dewantara, "Bapak Pendidikan Indonesia". Usul baru ketiga (3), adalah tanggal **9 Maret** (1950), yaitu saat diresmikannya nama Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI) sebagai pengganti dari BGKW bentukan pemerintah Belanda.

Bila dibandingkan dengan usul pilihan tanggal 12 Oktober, maka untuk pilihan "tanggal" berdirinya LKI ditinjau dari segi sejarah dapat dikatakan "yang lebih dulu memunculkan pemikiran tentang penyelenggaraan museum". Seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar LKI Pasal 4 berbunyi: "Menyelenggarakan museum-museum yang menyimpan hasil-hasil kebudayaan daerah-daerah Indonesia...." (Indonesia No. I-II, 1950: 123).

Dalam diskusi, usulan (1) tanggal 29 Januari maupun (2) tanggal 5 Maret kurang mendapatkan dukungan. Untuk usulan (3) yaitu tanggal 9 Maret (1950) saat diresmikannya berdiri LKI, pembahasan cukup panjang dan menarik. Tanggal itu cukup memiliki makna dalam sejarah permuseuman Indonesia karena menunjukkan sebagai titik awal lahirnya pemikiran kaum bumiputra untuk menata dan memajukan museum di Indonesia.

Kalau dilihat dari tata urutan sejarahnya, maka dimulai dengan tanggal diresmikannya LKI 9 Maret (1950), sebagai awal munculnya pemikiran tentang penyelenggaraan museum di Indonesia. Barulah kemudian diikuti dengan dibentuknya Bagian Urusan Museum tanggal 24 Desember (1957). Setelah lembaga itu terbentuk lahir pemikiran untuk diselenggarakannya Musyawarah Museum se-Indonesia I tanggal 12 Oktober (1962). Dengan demikian ketiga tanggal itu merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan, dan memiliki nilai sejarah yang kurang lebih sama.

Setelah dikaji dari berbagai sisi, hasil pembahasan akhirnya mulai mengerucut untuk memilih tanggal 12 Oktober(1962), yaitu ketika diselenggarakannya Musyawarah Museum se-Indonesia I di Yogyakarta sebagai "Hari Museum Indonesia". Berlangsungnya MMI pertama tahun 1962 di Yogyakarta dinilai memiliki bobot nilai sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan dua peristiwa sebelumnya. Tanggal itu disimpulkan memiliki nilai semangat kebersamaan yang tinggi, sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati, peristiwa itu sebagai "berfungsi sebagai sarana membangun 'persatuan dalam perbedaan' dengan adanya jejaring yang kuat di antara semua museum".

Semangat kebersamaan yang dibangun oleh para pendahulu itu masih tetap aktual hingga sekarang, karena MMI pertama tahun 1962 itu merupakan forum untuk menyatukan pokok-pokok pikiran para tokoh sehingga melahirkan konsep, kebijakan dan strategi pembangunan museum di Indonesia.

Dapat ditambahkan, pokok-pokok pikiran itu dinilai mengandung dimensi waktu masa lalu, masa kini, dan akan datang. Selain itu, peristiwa yang digagas oleh kaum bumiputra yang peduli pada museum setelah Indonesia merdeka itu juga merupakan pertemuan akbar untuk membangun permuseuman Indonesia.

Diorama di Museum
Satria Mandala

Kalau bobot dari ketiga tanggal itu hanya berbeda kecil, mengapa yang dipilih bukan yang lebih terdahulu yaitu tanggal **9 Maret (1950)** atau **24 Desember (1957)**? Untuk menjawab pertanyaan itu ada tiga contoh yang dapat dijadikan sebagai bahan bandingan. Pertama, ketika menentukan "Hari Ibu", yang dipilih adalah tanggal 22 Desember (1928) meskipun tahun 1912 telah lahir Organisasi Perempuan pertama. Demikian pula halnya dengan pemilihan "Hari Sumpah Pemuda", bukan memilih tanggal berlangsungnya Kongres Pemuda Pertama tahun 1926, tetapi Kongres Pemuda kedua tahun 1928. Bandingan yang ketiga, dalam pemilihan "hari jadi" kota Yogyakarta, yang dipilih adalah tanggal **7 Oktober,** yaitu saat sultan resmi menempati Keraton Kasultanan Yogyakarta. Bukan memilih tanggal ditandatanganinya Perjanjian Giyanti atau ketika pembagian Negara Mataram menjadi dua bagian secara resmi selesai seperti yang dipaparkan pada Bab III.

Dari ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa dapat saja pemilihan itu tidak didasarkan pada urutan usia peristiwa. Masih ada pertimbangan lain, yaitu berdasarkan pada bobot nilai yang dikandung oleh suatu peristiwa. Akhirnya, kesepakatan untuk memilih tanggal **12 Oktober** sebagai "Hari Museum Indonesia" yang dicapai dengan semangat musyawarah dan demokratis.

Selanjutnya, kesepakatan itu diperkuat dengan ditandatanganinya BERITA ACARA PENETAPAN HARI MUSEUM INDONESIA. Berita Acara dengan Nomor 1268/F.2/MU/2015 itu berbunyi sebagai berikut:

"Pada hari ini, Kamis 23 April 2015 bertempat di Ruang Rapat Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Gedung E, lantai 11, Jln. Jenderal Sudirman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah memperhatikan pemaparan dari para narasumber dan pendapat-pendapat yang dipaparkan para undangan, maka setelah melalui musyawarah telah disepakati tanggal ***12 Oktober*** *menjadi* ***"Hari Museum Indonesia".***

Pertimbangan didasari oleh rasa semangat para peserta musyawarah Museum untuk memajukan museum di Indonesia pada Museum I di Yogyakarta yang berlangsung tanggal 12 Oktober 1962.

Ditetapkan oleh peserta Diskusi Penetapan Hari Museum Indonesia (daftar hadir terlampir), yang terdiri atas: (1) Harry Widianto; (2) Intan Mardiana; (3) Edi Sedyawati; (4) Luthfi Asiarto; (5) Nunus Supardi; (6) Agus Aris Munandar; (7) Kresno Yulianto; (8) Soetrisno; (9) Gatot Gautama; (10) Arief Djoko Budiono; (11) Djulianto Susantio; (12) Dani Wigatna; (13) Tjahjopurnomo; (14) Edi Suwardi; (15) Muhammad Hasyim; (16) Gatut Dwi Hastoro; (17) Ki Bambang Widodo; (18) Agus Nugroho; (19) Zaimul Azzah; (20) Joko Madsono; (21) Firdaus; (22) Ridwan Fahrudin; (23) M. Amperawan Marpaung; (24) Ni Ketut Wardhani; (25) Andini Perdana; (26) Dian Trihayati.

Demikian, Berita Acara Penetapan Hari Museum ini dibuat dan tidak dapat diganggu gugat".

Di dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa **"Hari Museum Indonesia"** tanggal **12 Oktober** akan dideklarasikan bersamaan dengan acara Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia di Malang tanggal 26 Mei 2015. Disepakati pula bahwa deklarasi akan ditandatangan oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Ketua AMI dan AMIDA.

Drs. Mohammad Amir Sutaarga, pernah menjabat Sekretaris Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Weten-schappen, Kepala Museum Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI), Kepala Museum Pusat dan Direktur Museum. Pada tahun 2012 mendapat penghargaan "Lifetime Achievement Award" dan predikat "Bapak Permuseuman Indonesia" dari Komunitas Jelajah.

Museum Adalah "Milik Rakyat, Dari Rakyat, dan Untuk Rakyat" (Moh. Amir Sutaarga, 1937)

Deklarasi Hari Museum Indonesia

Dengan ditandata-nganinya Berita Acara Penetapan "Hari Museum Indonesia" oleh para peserta diskusi seperti diuraikan pada Bab V, maka status kesepakatan "tanggal" Hari Museum Indonesia menjadi sah dan kuat. Terutama sesuai dengan bunyi kalimat pada alinea bagian akhir yang menyatakan *"tidak dapat diganggu gugat"*, dapat diartikan bahwa pilihan tanggal **12 Oktober** sebagai **Hari Museum Indonesia** sudah dinyatakan final.

Sembilan "tanggal" yang diterima untuk dijadikan bahan diskusi pilihan menjadi catatan sejarah permuseuman di Indonesia. Kesembilan alternatif itu adalah: (1) tanggal berdirinya BGKW, **24 April** (1778); (2) tanggal berdirinya Museum Radya Pustaka, **28 Oktober** (1890); (3) tanggal berdirinya Museum Sonobudoyo, **6 November** (1935); (4) tanggal penyelenggaraan Seminar Hari Museum Indonesia, **23 Mei** (2010); (5) tanggal dibentuknya Urusan Museum, **24 Desember** (1957); (6) tanggal diselenggarakannya Musyawarah Museum se-Indonesia I, **12 Oktober** (1962); (7) tanggal digantinya nama BGKW menjadi LKI, **29 Februari** (1950);(8) tanggal lahirnya Drs. Moh. Amir Sutaarga **5 Maret** (1928) dan; (9) tanggal peresmian nama LKI, **9 Maret** (1950).

Acara Pembukaan Pertemuan Nasional Museum 2015 di Pendopo Walikota Malang. Prof. Kacung Marijan Ph.D, Sedang Memberikan Sambutan

Pemukulan Alat Musik Mirip Kentungan. Dari Ki-Ka Dr. Harry Widianto, Prof. Kacung Marijan Ph.D, Wakil Walikota Malang, Ridwan Hisyam (Ketua Komisi IX, DPR-RI), Putu Supadma Rudana (Ketua AMI)

Akhirnya, pendeklarasian pun terlaksana dengan sukses. Dilaksanakan bersamaan dengan acara "Pertemuan Nasional Museum 2015" (PNM), di Malang, Jawa Timur tanggal 26-28 Mei 2015. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas isu-isu dan paradigma baru dalam dunia permuseuman, melakukan diskusi dan dialog interaktif bagi para pengampu kebijakan, pengelola museum, pemerhati dan komunitas dalam rangka memajukan permuseuman di Indonesia.

Tema pertemuan itu adalah "Membangun Kualitas dan Kemandirian Museum". Adapun tujuannya adalah untuk mengenalkan pemikiran peran museum dalam pembangunan perekonomian (ekonomi kreatif) dan mensosialisasikan cetak biru pembangunan museum yang telah disusun. Selain itu juga untuk membicarakan mengenai kesiapan menyambut era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA), dan merumuskan langkah-langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan museum.

Penandatanganan Naskah Deklarasi Oleh Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dr. Harry Widianto

Acara pendeklarasian dilangsungkan di Balai Kota Malang, bersamaan dengan acara pembukaan PNM 2015 dan penyampaian pidato kunci *(keynote speech)* oleh Ketua Komisi IX DPR-RI, Ridwan Hisyam. Sebelum tiba pada acara pendeklarasian didahului dengan penjelasan singkat oleh Nunus Supardi mengenai latar belakang, proses, dan hasil pemilihan "Hari Museum Indonesia".

Pendeklarasian dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Kacung Marijan, Ph.D dengan membacakan naskah deklarasi. Selanjutnya diikuti dengan penandatanganan deklarasi oleh Ketua Asosiasi Museum Indonesia, Putu Supadma Rudana, para Ketua Asosiasi Museum Daerah (AMIDA), dan diketahui oleh Direktur Jenderal Kebudayaan, Prof. Kacung Marijan, Ph.D, dan Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dr. Harry Widianto.

Deklarasi dilaksanakan di Balai Kota Madya Malang, disaksikan oleh para pejabat Kota Malang, para Kepala Museum dan peserta PNM 2015.

Penandatanganan Naskah Deklarasi Hari Museum Indonesia

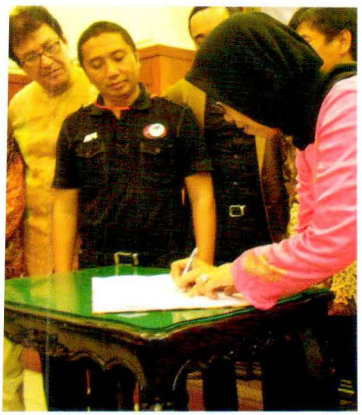

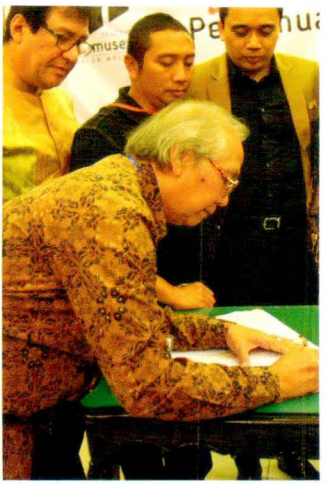

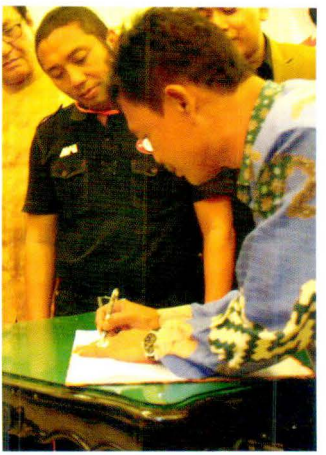

DEKLARASI
"HARI MUSEUM INDONESIA PADA TANGGAL 12 OKTOBER"

Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2015 (dua puluh enam mei tahun dua ribu lima belas), bertempat di Balai Kota, Kota Malang, Jawa Timur; para peserta Pertemuan Nasional Museum se-Indonesia Tahun 2015; yang dihadiri oleh: Beberapa Instansi dan Institusi Pembina dan Pendiri Museum, Kepala-kepala dan Staf Museum Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala-kepala dan Staf Museum Kementerian/BUMN, Kepala-kepala dan Staf Museum Swasta dan Pribadi, Para Pengurus Asosiasi Museum Indonesia Pusat dan AMIDA, Para Pengurus Badan Musyawarah Museum Jogyakarta, Para Pengurus Himpunan Museum Bali, Para Pengurus Asosiasi Museum Provinsi, mendeklarasikan, bahwa:

"Tanggal 12 Oktober disepakati dan dideklarasikan Hari Museum Indonesia"

Menjadi kewajiban seluruh museum dan museawan yang bergabung dalam organisasi Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Pusat dan Daerah (AMIDA), BARAHMUS, PARAMITA JAYA, HIMUSBA, bersama pemerintah Pusat dan Daerah untuk secara rutin menyelenggarakan acara peringatan.

Deklarasi ini ditanda-tangani oleh Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Pusat dan Daerah (AMIDA), BARAHMUS, PARAMITA JAYA, HIMUSBA, akan ditindaklanjuti dengan proses penetapan kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Direktoral Jendral Kebudayaan, cq. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman.

Malang, 26 Mei 2015.
Pembuatan Pernyataan,

2. Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Pusat

2. AMIDA Provinsi Sumatra

4. AMIDA Provinsi Banten

4. AMIDA Provinsi Jakarta

5. AMIDA Provinsi Jawa Barat

6. AMIDA Provinsi Jawa Tengah

7. Badan Musyawarah Museum Jogyakarta

8. ~~AMIDA Jawa Timur~~

7. Badan Musyawarah Museum Jogyakarta

8. AMIDA Jawa Timur

9. AMIDA Kalimantan/Sulawesi/Indonesia Timur

10. Himpunan Museum Bali

11. AMIKA Taman Mini Indonesia Indah

12. Museawan

Mengetahui:

Direktur Jenderal Kebuyaan,

Prof. Kacung Marijan, Phd.

Direktur Pelestarian Cagar Budaya & Permuseuman,

Dr. Harry Widianto

Naskah Pernyataan Hari Museum Indonesia

Naskah Deklarasi "Hari Museum Indonesia" Setelah Dibaca dan Ditandatangani, Diperlihatkan Kepada Peserta Pertemuan Nasional Museum 2015 di Malang

Penutup

Dengan dideklarasi-kannya tanggal **"12 Oktober"** sebagai **"Hari Museum Indonesia"**, pada tanggal 26 Mei 2015, maka cita-cita para museawan untuk memiliki "Hari Museum". Seperti halnya bidang-bidang kebudayaan yang lain, pada setiap tanggal, dan setiap tahun akan merealisasikan deklarasi itu.

Menjadi kewajiban seluruh museum dan museawan yang tergabung dalam organisasi AMI Pusat dan Daerah (AMIDA), BARAHMUS, Paramita Jaya, HIMUSBA, serta komunitas dan para penggiat museum, bersama-sama dengan pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi lain terkait untuk secara rutin menyelenggarakan acara peringatan.

Semoga melalui deklarasi "HARI MUSEUM INDONESIA", permuseuman di Indonesia menjadi semakin berkembang maju.

Jakarta, 14 Juni 2016

DAFTAR REFERENSI

Biran, Misbach Yusa. 2009. *Sejarah Film 1900-1950*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Departemen Pendidikan Nasional

Munandar, Agus Aris. "Makna Hari Museum dalam Perkembangan Museum di Indonesia". *Seminar Hari Museum"*, Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta 22-23 Mei 2010.

----------. 2010. Draft Naskah Akademik Hari Museum Indonesia.

Sedyawati, Edi. "Museum Untuk Persatuan dalam Perbedaan". Makalah dipaparkan pada *Seminar Hari Museum"*, Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta 22-23 Mei 2010.

Supardi, Nunus. "*Peran Hari Museum dalam Pengembangan Museum di Indonesia*". Makalah dipaparkan pada Seminar di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta 22-23 mei 2010.

----------. 2013. *Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah: dari Masa ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

----------. 2013. *Bianglala Budaya: 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Sutaarga, Moh. Amir. 1962. *Persoalan Museum di Indonesia*. Jakarta: Djawatan Kebudayaan.

----------. 1973. *Museum dan Permuseuman di Indonesia*.

MAJALAH

Tashadi. *Hari Lahir Museum di Indonesia*. Museografia. Hal 28.

Majalah Indonesia I-II, Badan Musyawarat Kebudayaan Nasional tahun 1950.

SURAT KABAR

Kompas, 5 Juli 2007

Kompas, 18 April 2009

Kompas, 8 Mei 2014

INTERNET

http://bambang-rustanto.blogspot.com/2010/01/hari-kesetiakawanan-sosial-nasional.html

http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah%2C+Jenis +Dokumen+Pencacahan+yang+Digunakan%2C+dan+Jenis +Kelamin&tid=337&search-wilayah=Indonesia&wid=0000000000&lang=id

Riwayat Hidup penulis

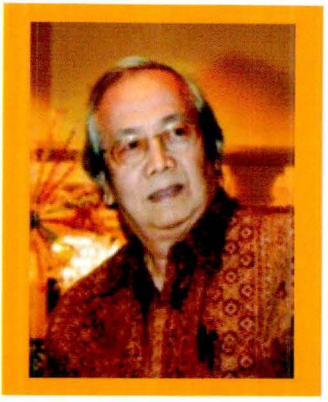

Nunus Supardi bin Karsodimedjo lahir di Madiun, 19 Agustus 1943. Pernah menjadi Asisten Dosen merangkap Kepala Tata Usaha pada IKIP Malang Cabang Madiun (1965-1973). Selama di Madiun, ia pernah menjadi pengajar di Sekolah Asisten Apoteker Madiun (SAA), PGSLP, dan IKIP PGRI.

Pada tahun 1973 pindah ke Jakarta menjadi staf di Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Perjalanan kariernya di lembaga kebudayaan ini, antara lain pernah menjabat Kepala Bagian Perencanaan (1985-1993), Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan (1993-1999), dan Direktur Direktorat Purbakala (1999-2001). Setelah itu, ia dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (5 Februari—14 November 2001). Sebelum memasuki purnabakti pada 2003, Nunus masih memangku jabatan sebagai Sekretaris Utama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.

Setelah pensiun aktif di Badan Kerja sama Kebudayaan Indonesia (BKKI), salah satu pendiri Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), salah satu pendiri Lingkar Budaya Indonesia (LBI). Dalam kurun waktu 2005-2008, menjadi anggota Lembaga Sensor Film (LSF) dan Wakil Ketua LSF periode 2009-2014. Namanya juga tercatat sebagai anggota IAAI dan anggota Dewan Pakar Asosiasi Museum Indonesia (AMI) dan anggota Tim Ahli Panitia Nasional Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Departemen Kelautan dan Perikanan (2004-2009). Pernah menjadi salah satu anggota Dewan Juri Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan anggota Panitia Seleksi Film Edukatif Kultural pada 2012 dan 2013, serta anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Lembaga Sensor Film (2014). Berbagai tulisannya dimuat dalam surat kabar, majalah dan diterbitkan dalam beberapa judul buku.

Gedung eks De Nederlandsche Handel-Maatschappij, kini menjadi Museum Bank Mandiri

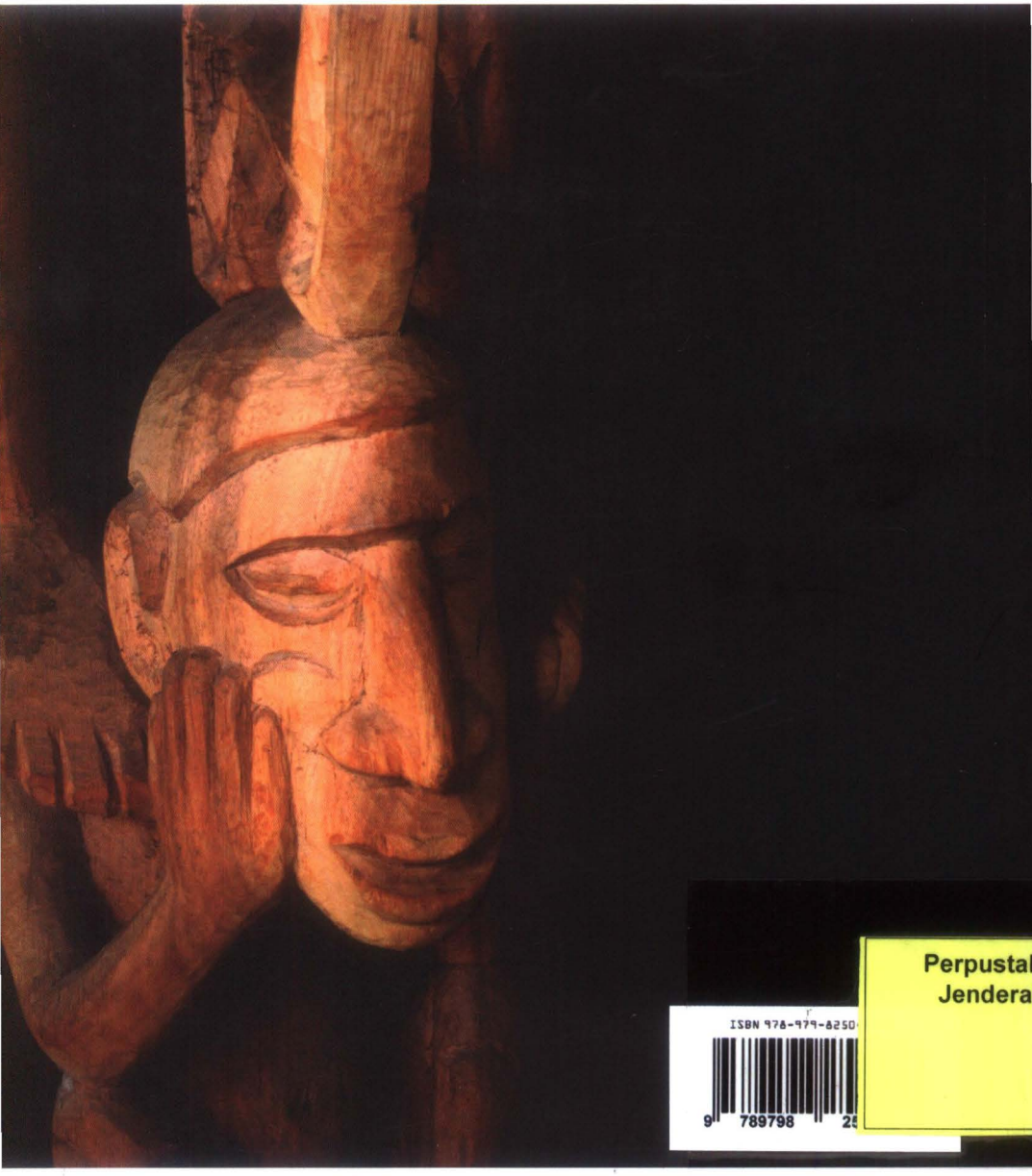

Perpusta
Jendera

ISBN 978-979-8250
9 789798 2

museum di hatiku

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Kompleks Kemdikbud Gd. E, Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp/Fax (021) 5725531, 5725048

Cagar Budaya Indonesia